

**PANDANGAN HARIAN KOMPAS
TERHADAP KASUS BIBIT – CHANDRA
(Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas
Periode 1 Oktober – 31 Desember 2009)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi



Oleh :

Rahajeng Dyah Utami

D0206088

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

PANDANGAN HARIAN KOMPAS

TERHADAP KASUS BIBIT – CHANDRA

(Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas

Periode 1 Oktober – 31 Desember 2009)

Oleh:

Rahajeng Dyah Utami

D 0206088

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing

Drs. Mursito, BM, SU

NIP. 19530727/198003 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PANDANGAN HARIAN KOMPAS

TERHADAP KASUS BIBIT – CHANDRA

(Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas

Periode 1 Oktober – 31 Desember 2009)

Oleh:

Rahajeng Dyah Utami

D 0206088

Telah diuji dan disahkan Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Hari: Senin

Tanggal: 20 Desember 2010

Panitia Ujian Skripsi:

1	Ketua Panitia	Drs. Subagyo, SU NIP. NIP. 19520917 198003 1 001	
2	Sekretaris	Drs. Mahfud Anshori, M.Si NIP. NIP. 19790908 200312 1 001	
3	Penguji	Drs. Mursito, BM, SU NIP. 19530727 198003 1 001	

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Drs. H. Supriyadi, SN, S.U.

NIP. 130 936 616

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PANDANGAN HARIAN KOMPAS
TERHADAP KASUS BIBIT – CHANDRA
(Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas
Periode 1 Oktober – 31 Desember 2009)**

Adalah karya asli saya dan bukan plagiat baik secara utuh atau sebagian serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di institusi lain. Saya bersedia menerima akibat dari dicabutnya gelar sarjana apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti-bukti yang kuat, bahwa karya saya tersebut ternyata bukan karya saya yang asli atau sebenarnya.

Surakarta, Januari 2011

Rahajeng Dyah Utami

NIM. D 0206088

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S Al Insyirah : 6)

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir

(Q.S Yusuf : 87)



PERSEMBAHAN



Karya ini saya persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak-kakak tersayang
- Almamater

commit to user

KATA PENGANTAR

Segenap kerja keras yang penulis lakukan, tidaklah cukup untuk menyelesaikan skripsi ini bila tanpa bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Mursito, BM, SU selaku dosen pembimbing skripsi yang telah tanpa lelah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
3. Drs. Supriyadi SN, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Drs. Nuryanto, MSi selaku pembimbing akademis.
5. Segenap staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fisip UNS.
6. Orangtua serta kakak-kakak yang senantiasa memberi banyak sekali motivasi dalam penggarapan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Siska, Ivan, Neri, Kusnul, Eke, Eva, Madina, Mita.. yang telah setia membantu dan mendampingi selama berjalannya proses, terimakasih kawan.

8. Mas Udin, mas Arif, mas Dhanu, mas Eko, mbak Okti, mas Bobit, mas Tri yang selalu bersedia menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah serta tak pernah lelah memberikan semangat dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman Komunikasi '06 yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama menyelesaikan studi di UNS.
10. Pihak - pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, hal itu tak kurang dan tak lebih merupakan proses pembelajaran bagi penulis. Skripsi ini masih membutuhkan masukan ataupun saran dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kajian Teori.....	13
1. Komunikasi Massa	13
2. Pers	19

3. Tajuk Rencana	25
4. Wacana	37
5. Kasus Bibit - Chandra	40
E. Kerangka Konsep dan Pemikiran	42
1. Kerangka Konsep	42
a. Pandangan Media	42
b. Tajuk Rencana	42
c. Analisis Wacana	44
2. Kerangka Pemikiran	44
F. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Objek Penelitian	47
3. Teknik Pengumpulan Data	48
4. Teknik Analisa Data	48
 BAB II DESKRIPSI HARIAN KOMPAS	
A. Sejarah Singkat	52
B. Visi dan Misi	56
C. Nilai-nilai Dasar	58
D. Kebijakan Redaksional	60
E. Rubrikasi	61
1. Kompas Nasional	61
2. Kompas Lokal	64
F. Struktur Organisasi	67

commit to user

G. Susunan Redaksi.....	69
BAB III ANALISA TAJUK RENCANA KOMPAS	
A. Tematik Tajuk Rencana Kompas	71
1. Kasus Bibit-Chandra Sebagai Kasus Hukum.....	72
2. Dampak Terhadap Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II	77
3. Dukungan dari Masyarakat	79
B. Skematik Tajuk Rencana Kompas.....	82
C. Semantik Tajuk Rencana Kompas	103
1. Latar.....	103
2. Detail	109
3. Maksud	113
4. Praanggapan	117
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I	Kerangka Pemikiran	45
Gambar II	Struktur Organisasi Harian Umum Kompas	68



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Tajuk Rencana Harian Kompas	47
Tabel II	Aplikasi Teknik Analisa Wacana van Dijk	49
Tabel III	Tematik Tajuk Rencana Kompas	81
Tabel IV	Skematik Tajuk Rencana Kompas	100
Tabel V	Latar Tajuk Rencana Kompas	108
Tabel VI	Detail Tajuk Rencana Kompas	112
Tabel VII	Maksud Tajuk Rencana Kompas	117
Tabel VIII	Praanggapan Tajuk Rencana Kompas	119

ABSTRAK

Rahajeng Dyah Utami, D0206088, Pandangan Harian Kompas Terhadap Kasus Bibit – Chandra (Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas Periode 1 Oktober – 31 Desember 2009), Skripsi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan Kompas dalam tajuk rencana mengenai kasus Bibit dan Chandra (dua pimpinan non aktif KPK) yang dimuat oleh Kompas periode 1 Oktober – 31 Desember 2009 dimana tajuk rencana merupakan representasi dari pandangan dan opini suatu media. Kasus yang melibatkan Bibit dan Chandra ini mendapat perhatian besar dari pemerintah dan media serta menjadi wacana yang kerap diperbincangkan oleh berbagai khalayak, disebabkan karena kasus dugaan korupsi ini melibatkan lembaga yang berwenang untuk memberantas korupsi serta aksi reaksi yang luar biasa, muncul dari masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian kualitatif juga lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisa tajuk rencana-tajuk rencana tersebut, penulis menggunakan metode analisis wacana dengan model yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Penulis melakukan penelitian hanya dari level teks, untuk membongkar makna yang terkandung dalam tajuk rencana. Model ini membagi teks menjadi tiga struktur, yaitu struktur makro yang memuat tematik dari tajuk rencana. Kemudian yang kedua adalah superstruktur yang berhubungan dengan kerangka teks. Dan yang terakhir adalah struktur mikro, yang mengamati wacana dari elemen latar, detail, maksud dan praanggapan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Kompas memandang kasus yang terjadi itu dari berbagai sisi, yakni dari permasalahan kasus hukum, pengaruhnya kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang baru saja terbentuk dan dari masalah sosial perihal gelombang dukungan dari publik yang membela Bibit dan Chandra. *Kedua*, dalam pendapatnya, Kompas banyak memandang dari segi akibat dari kasus yang sedang terjadi. *Ketiga*, terkait dengan wacana penanganan kasus, menurut penulis, Kompas banyak menyetujui atau setidaknya mengungkapkan penghargaan kepada pemerintah yang telah bekerja keras berusaha menyelesaikan kasus tersebut beserta langkah-langkah yang diambilnya. *Keempat*, menurut isinya, tajuk rencana Kompas dikategorikan sebagai tajuk rencana informatif, karena berisi informasi dan keterangan-keterangan latar belakang sesuatu hal atau masalah. Jenis tajuk ini juga dinamakan tajuk bersifat interpretasi, penjelasan atau penggelaran.

commit to user

ABSTRACT

Rahajeng Dyah Utami, D0206088, The Kompas Opinion in Editorial hits Bibit and Chandra Case (The Analysis of Textual Discourse on Kompas Editorial Period 1 October – December 31 2009), Skripsi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

This research was meant to detected Kompas opinion in editorial hits Bibit and Chandra case (two leaderships non mobile KPK) that held by period Kompas 1 October - 31 Decembers 2009 where the editorial was th representative of point of view and opinion of a media. Case that involved Bibit and Chandra got big attention from government and and became trending topic in society, caused this corruption guess case involve the institution that had authority in corruption removing, the society showed their action and reaction.

This research used research methodology had qualitative-descriptive. Descriptive research only showed situation or event. Qualitative research also more meant to propose description and/or comprehension (understanding) about and why a phenomenon or reality with analyze and present fact systematically to simplify comprehension and conclusion withdrawal.

To analyzed the editorials, author used text analysis method with model that developed by Teun A. van Dijk. Author did only from level text, to break into meaning that implied in editorial. This model divides text is three structures, which were macro structure that holds tematik from editorial. Then second superstructure that text sketch. And last structure micro, watched closely word from surface element, detail, purpose and presupposition.

Based on result of the research, author concluded that Kompas looked at the from various side, they were from law case troubleshoot, the influenced to ally Indonesia cabinet government II which was just formed and from support wave event social problem from public that defended Bibit and Chandra. Second, in the opinion, Kompas saw from aspect effect of case that was happening. Third, related to case handling word, author had an opinion that Kompas many approve or at least unfold appreciation to government that strive to try to finish case along with steps they took. Fourth, based on its contain, Kompas editorial was classified as informative editorial, because it has information and background description of something or a case. This editorial is also known as interpretation, description or show off editorial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pers, pada pokoknya berfungsi untuk menyalurkan informasi dan menghibur. Malah dapat dikatakan bahwa lahirnya pers itu sendiri karena adanya kebutuhan akan informasi. Hal itu dikarenakan secara alamiah, pengetahuan manusia memang terbatas. Di dalam perkembangan hidup manusia, informasi senantiasa menduduki posisi penting baik sebagai sarana penambah wawasan terlebih lagi dalam kegunaan praktisnya sebagai komoditas untuk mempertahankan eksistensi hidup.

Di dalam kehidupan manusia bahkan berkembang etos, yang dinukil dari ungkapan Johan Galtung, seorang aliran naturalis, bahwa siapa yang menguasai informasi ia adalah raja dan siapa yang menguasai proses informasi maka dia adalah penguasa (absolut).¹ Jakob Oetama dalam tulisannya *Kebutuhan Informasi Bagi Pembaca Surat Kabar Indonesia*, menyebutkan dua hal yang menjadi latar belakang menajaknya keperluan akan informasi, yaitu perkembangan manusia serta perkembangan lingkungan dan masyarakatnya. Terjadi interaksi antara kemajuan warga masyarakat dengan masyarakatnya. Tidaklah suatu kebetulan, bahwa dalam masyarakat yang berkembang maju, prasarana informasi dan media massa pun tumbuh dengan

¹ *Ibid*, hal. 75.

subur. Negara yang industrinya paling berkembang seperti Jepang dan Amerika Serikat, amat jauh pula kemajuan industri informasinya.²

Dalam pasal 19 konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966 disebutkan, (1) setiap orang akan berhak mempunyai pendapat tanpa dicampurtangani; (2) setiap orang akan berhak menyatakan pendapat: hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tertulis atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri; (3) pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Maka dari itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang diperlukan untuk : a) menghormati hak atau nama baik orang lain, b) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.³

Berdasarkan konvensi di atas, tiap warga negara diberikan jaminan atas hak untuk menerima dan memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis atau tercetak, termasuk mengekspresikan karya seni. Pembatasan hanya boleh atas dasar undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan ketentuan itu, pemerintah di berbagai negara memberikan proteksi terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi.

² Jakob Oetomo dalam *Persuratkabaran Indonesia Dalam Era Informasi*, Grafika Pers, Jakarta, 1986, hal 184.

³ Samsul Wahidin, *loc. cit.*, hal. 74.

Namun terlepas dari fungsi menyebarkan informasi, fungsi menyuarakan kebenaran tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Jack Fuller menyatakan “*tujuan utama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran sehingga orang-orang akan mempunyai informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat*”. Selain itu, dalam hal dan batas tertentu seseorang tidak akan bisa dan tidak mungkin mengontrol, menguji dan membuktikan kebenaran atas informasi yang ia terima. Oleh karena itu hakekat dari sebuah informasi adalah kebenaran.⁴ Dan di sisi lain pers juga bertindak sebagai *watchdog* (anjing penjaga) terhadap pemerintah. Bill Kovach dalam bukunya *Elemen-Elemen Jurnalisme* pun menjelaskan bahwa prinsip anjing penjaga ini bermakna tak sekedar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua lembaga yang kuat di masyarakat. Jadi pers sebenarnya memiliki tugas moral untuk melayani dan memajukan masyarakat, di samping memiliki kepentingan bisnis yang bersifat komersil.

Sementara itu penerbitan pers, khususnya surat kabar, secara umum di dalamnya terdapat tiga komponen. Komponen pertama adalah penyajian berita. Komponen kedua adalah pandangan atau pendapat. Pandangan atau pendapat ini disebut opini. Dan komponen ketiga adalah periklanan.⁵

Dja'far H Assegaf mengartikan berita sebagai laporan tentang fakta atau ide yang termassa dan dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang kemudian dapat menarik perhatian pembaca, entah karena luar biasa, karena pentingnya atau akibatnya, karena mencakup segi-segi *human*

⁴ *Ibid*, hal. 78.

⁵ Drs. Totok Djuroto, M. Si, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 46.

interest seperti humor, emosi dan ketegangan.⁶ Berita sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni *hard news* dan *soft news*. *Hard news* atau *straight news* (berita langsung) adalah berita yang ditulis secara langsung. Artinya, informasi yang dituangkan dalam berita itu diperoleh langsung dari sumber beritanya. Penulisan berita langsung lebih mengutamakan aktualitas informasinya.⁷ Sedangkan *soft news* atau *features* adalah penyampaian fakta yang ditulis dengan gaya ringan.

Selain menyampaikan berita, perusahaan penerbitan pers perlu menyajikan pendapat atau pandangan, baik opini masyarakat (*public opinion*), maupun opini redaksi (*desk opinion*). Opini itu sendiri adalah sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik, dan saran kepada sistem kehidupan bermasyarakat yang merupakan kontrol bagi pelaksana pemerintahan. Berpendapat atau beropini merupakan suatu kebebasan. Kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi. Pada umumnya para pemikir mempunyai persepsi yang sama tentang apa saja kebebasan yang harus ada pada setiap insan. Karena hak asasi itu bersifat Universal maka beberapa ketentuan dalam konvensi internasional berkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis kiranya perlu disebutkan. Dalam deklarasi PBB pasal 19 berbunyi :

*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.*⁸

⁶ *Ibid*, hal. 47.

⁷ Totok Djuroto, *op.cit* hal. 49.

⁸ Samsul Wahidin, *op.cit*, hal. 59.

Opini adalah tulisan dalam media massa yang memasukkan pendapat penulis di dalamnya (subjektif). Jenis tulisan yang berisi opini ini disebut juga *Views*, seperti artikel, tajuk rencana (*editorial*), surat pembaca, pojok dan karikatur. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang akan menjadi fokus pembahasan adalah tajuk rencana atau *editorial* dimana pandangan media terhadap suatu persoalan akan tampak.

Khusus opini pers (*press opinion*) dalam surat kabar biasanya terdiri dari tiga jenis, yakni tajuk rencana, pojok dan karikatur. Dalam setiap surat kabar pada umumnya terdapat satu halaman yang menyediakan ruang untuk memuat opini atau pendapat umum. Pemisahan halaman untuk pendapat atau opini didasarkan pada praktek jurnalistik, yaitu memisahkan fakta dengan opini. Dan Harian Kompas mempunyai halaman tersendiri untuk memuat opini tersebut. Dua halaman yakni halaman 6 dan 7 harian Kompas digunakan untuk memuat opini, baik itu tajuk rencana, artikel, karikatur, pojok, maupun surat pembaca.

Dari beberapa jenis opini pers (tajuk rencana, pojok, karikatur) tersebut yang paling utama dan penting yakni tajuk rencana. Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Secara teknis jurnalistik, tajuk rencana diartikan sebagai opini redaksi berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual dan atau kontroversial yang terdapat dalam masyarakat.

Tajuk rencana dan komentar cenderung untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diberitakan. Pekerjaan menulis tajuk rencana pertama-tama dan terutama adalah mendorong daya pikir pembaca dan mengajak pembaca untuk berbincang tentang sesuatu sebelum pendapat umum itu tersimpul.⁹

Dalam sebuah buku biografi tentang harian *The New York Times* yang ditulis oleh Gay Talese, mengatakan,

*“The editorial page, Oakes believes, is the ‘soul’ of a newspaper, a reflection of its inner character and philosophy..”*¹⁰

Yang berarti, tajuk adalah jiwa sebuah surat kabar yang mencerminkan karakter internnya dan falsafahnya.. John Oakes dalam harian *The New York Times* adalah *editor of the editorial page*.

Menurut Dr. Lyle Spencer dalam *Editorial Writing* mendefinisikan tajuk rencana sebagai penyajian fakta dan opini yang disusun secara ringkas, logis dan menyenangkan untuk menghibur, mempengaruhi opini atau menginterpretasikan berita penting sedemikian rupa sehingga yang pentingnya itu menjadi jelas bagi rata-rata pembaca (Effendy, 2008: 135).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa tajuk rencana adalah rubrik terpenting bagi para jurnalis di sebuah koran harian untuk mempengaruhi opini publik secara langsung, membentuk cara pandang terhadap suatu isu yang berkembang dalam masyarakat, serta mendukung atau menolak kebijakan pemerintah.

⁹ Prof. Dr. Floyd G. Arpan, *Wartawan Pembina Masyarakat*, Penerbit Binajipta, Jakarta, 1970, hal. 170.

¹⁰ Sabam Siagian dalam *Persuratkabaran Indonesia Dalam Era Informasi*, *op.cit*, hal 29.

Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana media bisa membebaskan diri dari tekanan-tekanan yang mempengaruhi penyikapannya terhadap suatu topik atau peristiwa. Untuk itu, Schejter dan Davidson menyarankan:

*Structural separation of news and business operations of media; blind trusts to control media owners' assets; visible (at all times) identification of the commercial nature of media as well as the source of information within news stories; physical separation of commercially motivated information (such as press releases) from journalistic content; and online tools that can identify content that has been imported from another source, in particular, a PR source.*¹¹

Tajuk rencana, yang secara jelas menampilkan penyikapian dari media ini, harus tetap bisa menunjukkan independensinya. Untuk itu, media (dalam hal ini wartawan) harus melakukan objektifikasi sendiri atas suatu kenyataan/peristiwa. Berita yang berasal dari salah satu sumber berita saja –misalnya pemerintah—berarti bahwa berita itu adalah konstruksi realitas media dari konstruksi realitas pihak tertentu. Dengan demikian, media secara sadar atau tidak sadar telah menempatkan diri sebagai ‘alat propaganda’ salah satu pihak.

Senada dengan hal tersebut, Tan Hongkai, editor kolom opini *China Daily*, mempersoalkan tentang pandangan media dalam kepentingan pemerintah.

“We make relatively independent decision as an organization; our opinions are entirely ours – not directly tied up with official background, as we’re often viewed, nor issued on someone else’s instructions. We do not represent ourselves as a mouthpiece...” (Hongkai, 2008: 55).¹²

¹¹ Lebih lengkapnya lihat Amit M Schejter dan Roei Davidson, *The News Corp.—Dow Jones Merger and the Separation of Editorial and Business Practices*, dalam *International Journal of Communication* 2 (2008), dapat diakses di www.ijoc.org.

¹² Paul Sutherland. *China Project*. 2010. Dapat dilihat di www.ejournalist.com.au

Dari pernyataan Tan di atas dapat terlihat jelas bahwa mereka berusaha untuk tetap obyektif dan mengklaim diri mereka bukanlah sebagai juru bicara bagi pemerintah.

Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Tajuk rencana biasanya tidak luput dari berita-berita yang disajikan pada surat kabar tersebut pada saat itu. Artinya, tajuk rencana biasanya merupakan opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan.

Jakob Oetama sebagai “bapak” bagi seluruh wartawan Kompas dalam tulisannya pernah mengungkapkan bahwa tajuk adalah suara lembaga koran tersebut, maka sebenarnya tajuk rencana mestilah tidak bersifat “personal” melainkan “institusional.” Untuk dapat “institusional”, perlu dikembangkan beberapa saling pengertian. Di antaranya, bagi Kompas diusahakan agar tajuk rencana itu mengungkapkan fakta, baru kemudian komentar atas fakta tersebut. Ada fakta, ada persoalan, ada beberapa alternatif pemikiran atau pemecahan, lantas ditunjukkan beberapa yang dianggap cocok.

Dalam tulisannya tersebut Ia juga menambahkan, bahwa tajuk rencana dalam Kompas dimaksudkan tidak menunjukkan jalan keluar, apalagi menggurui, namun sekedar mengisyaratkan, menunjukkan kemungkinan alternatif dan menunjukkan beberapa segi yang belum dimasukkan dalam

pertimbangan. Sering juga untuk menunjukkan apa-apa saja yang sebenarnya dirasakan atau dipersoalkan oleh masyarakat.¹³

Pada awal-awal terbit, tajuk rencana yang merupakan sikap dari surat kabar belum dimunculkan oleh Harian Kompas, tetapi di halaman dua terdapat tulisan tentang kelahiran Harian Kompas, yang kemudian dikenal sebagai tajuknya Kompas. Kemudian Pada tanggal 5 Agustus 1965 kolom “Tadjuk” Kompas berganti menjadi “Tadjuk Rencana.”¹⁴ Pada saat ini Kompas menyajikan tajuk rencana sebanyak dua buah, yakni satu untuk isu nasional dan yang lainnya tentang permasalahan internasional.

Kompas dalam penyajian tajuk rencananya juga tak lepas dari isu atau peristiwa-peristiwa aktual yang sedang terjadi. Masalah aktual yang mencuat sekitar pertengahan tahun yang lalu dan sering muncul di berbagai media massa tak lain adalah masalah terkait kasus dugaan korupsi yang menyangkut pejabat-pejabat penting di pemerintahan kita. Kasus Bibit-Chandra yang terjadi belum lama ini mendapat perhatian besar dari pemerintah dan media serta menjadi wacana yang sangat ramai diperbincangkan oleh hampir semua kalangan. Kasus Bibit-Chandra banyak mewarnai di berbagai media, baik televisi, media cetak, radio, maupun internet. Kasus ini bergulir seakan tiada henti, dan terus berkembang. Hal itu dikarenakan Bibit-Chandra merupakan pimpinan sebuah lembaga/ komisi yang bertujuan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Masalahnya pun menjadi semakin kompleks karena menyangkut

¹³ Jakob Oetama, *Pengalaman Sebagai Wartawan dalam Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal 138.

¹⁴ Sularto, *KOMPAS Menulis dari Dalam*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal 149.

banyak pihak, baik perseorangan maupun lembaga, bahkan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut dicatut.

Kompas juga tercatat tak sedikit membahas isu tersebut dalam tajuk rencananya. Sejak akhir bulan Oktober 2009 hingga awal Desember 2009, saat kasus tersebut sedang hangat-hangatnya, Kompas tercatat menyajikan 18 tajuk rencana terkait kasus tersebut. Salah satunya yakni tajuk rencana yang menyoroti tentang penahanan dua pimpinan KPK (pada tanggal 29 Oktober 2009 Mabes Polri mengumumkan penahanan Chandra dan Bibit, dengan alasan dikhawatirkan menggalang opini dengan menggelar jumpa pers). Kompas dalam tajuk rencana tersebut merasa “geram” dengan apa yang terjadi. Opini seperti itu seakan mewakili apa yang dirasakan publik.

Kita memahami reaksi dan keprihatinan publik atas penahanan Bibit dan Chandra. Solidaritas masyarakat sipil dengan cepat tergalang untuk memintakan penangguhan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. Hakim MK juga menyayangkan penahanan yang dilakukan terburu-buru. Alasan penahanan yang salah satunya adalah kerapnya tersangka berbicara kepada pers juga dipertanyakan. Berbicara kepada publik adalah hak asasi manusia dan setiap tersangka tentunya mempunyai hak membela diri!

*Kita berharap semua pihak berkepala dingin dan tidak sekadar unjuk kekuasaan dalam menangani masalah yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Terlalu banyak persoalan yang belum diselesaikan berkaitan dengan kisruh KPK. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang belum juga diputuskan nasibnya oleh DPR. Dalam latar itu, kita mendukung langkah hukum yang akan diambil kuasa hukum Chandra dan Bibit. Kita tak ingin koruptor melakukan serangan balik dengan memecah belah institusi negara demi untuk melanggengkan korupsi di negeri ini!*¹⁵

Kemudian Chandra dan Bibit ditahan di Rutan Bareskrim Polri, saat melakukan wajib lapor. Sebelumnya mereka mengikuti sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Dari sinilah muncul istilah KPK VS POLRI

¹⁵ *Penahanan Yang Kontroversial*, tajuk rencana *Harian Kompas* tanggal 30 Oktober 2009.

¹⁶ <http://joglopos.com/kronologi-chandra-bibit-menuju-tahanan-rutan-bareskrim>.

atau CICAQ VS BUAYA. Kasus ini mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Dari masyarakat sendiri timbul banyak reaksi. Mereka menganggap penahanan dua pimpinan KPK itu tidak sesuai atau hanya rekayasa saja. Kompas juga memberikan pendapatnya mengenai masalah CICAQ VS BUAYA ini.

William J Chamblis, yang pernah melakukan studi di sejumlah kota di Amerika Serikat, menyebut korupsi di pengadilan merupakan bagian integral dari birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir penguasa, penegak hukum, dan politisi yang sukar dibongkar. Sebuah jejaring korupsi yang sempurna melibatkan elite di pusat kekuasaan, elite eksekutif, elite partai politik, petinggi peradilan, dan kalangan bisnis. Tapi itu di Amerika.

Di Indonesia, mafia peradilan adalah isu lama yang tidak pernah kita akui keberadaannya, dan kita pun seakan tak berdaya menghadapinya. Sampai-sampai Indonesianis Daniel S Lev pernah mengusulkan agar semua hakim dan jaksa dipecat dan digantikan orang yang sama sekali baru.

Hikmah harus kita ambil dalam perseteruan Polri dan KPK. Segala borok telah terungkap. Masalahnya, apakah borok ini akan kita biarkan atau kita jadikan momentum melakukan pembersihan total di tubuh lembaga penegak hukum serta merevisi KUHP dan juga KUHPA!¹⁷

Di luar tajuk-tajuk rencana Kompas tersebut, sebenarnya tajuk rencana mengenai korupsi bukanlah hal baru. Tajuk semacam ini telah banyak lahir dari buah karya para redaktur surat kabar. Yang terkenal adalah tajuk-tajuk Mochtar Lubis yang dimuat di harian Indonesia Raya. Tajuk-tajuk tersebut bahkan dibukukan dalam buku berjudul Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri 2 : Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, ABRI. Dalam buku tersebut yang berisi tentang masalah korupsi dan ekonomi, kesemuanya pernah dimuat dalam harian Indonesia Raya dalam kurun waktu tahun 1968-1974. Misalnya saja, Mochtar Lubis sendiri pernah memberikan definisinya mengenai bahaya korupsi.

Korupsi yang merajalela (jika tak hendak dikatakan telah bertambah merajalela) di Tanah Air kita mutlak harus diberantas jika hendak menjaga kelangsungan penghidupan bangsa dan negara kita. Jika kita memeriksa sejarah yang lampau dan pula sejarah masa kini, maka senantiasa dalam sejarah keruntuhan berbagai kerajaan dan peradaban kita melihat unsur korupsi ikut memegang peran dalam keruntuhan kerajaan-kerajaan tersebut...

Berangkat dari latar belakang di atas akan sangat menarik apabila penulis dapat meneliti tentang masalah ini. Dan atas dasar media massa yang memiliki kebebasan untuk memilih sikapnya: baik menentang kebijakan pemerintah, mendukung, atau berdiri di antara keduanya (netral/independen), maka diperlukan suatu metodologi yang sangat komperensif untuk melihat lebih jauh dalam membongkar cara pandang media tersebut. Analisis tajuk rencana dilakukan pada level teks melalui elemen tematik, skematik dan skematik berdasarkan analisis wacana Van Dijk.

Penulis mengambil obyek penelitian yakni tajuk rencana Kompas yang dimuat pada periode 1 Oktober – 31 Desember 2009, terutama yang membahas mengenai kasus Bibit-Chandra. Penulis memilih tajuk rencana dengan topik tersebut karena pada waktu itulah saat-saat pemberantasan korupsi yang menjadi masalah besar di negeri ini mendapat mendapat ujian berat. Dan kasus Bibit-Chandra yang sempat ‘menghebohkan’ di negara kita juga tak lepas dari pantauan Kompas. Koran ini memuat tajuk rencana terkait kasus tersebut kurang lebih sebanyak 18 buah, selama periode tak lebih dari tiga bulan. Hal yang menarik untuk mengetahui dan mempelajari pemikiran dan pandangan Kompas dalam memaknai, memahami, dan menyikapi kasus/

peristiwa tersebut. Dan dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti 8 tajuk dari 18 tajuk yang dimuat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, didapatkan sebuah perumusan masalah, yaitu:

“Bagaimana pandangan Kompas terhadap kasus Bibit-Chandra dalam tajuk rencana yang dimuat pada periode 1 Oktober - 31 Desember 2009?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pandangan Kompas terhadap kasus Bibit-Chandra dalam tajuk rencana yang dimuat pada pada periode 1 Oktober - 31 Desember 2009.

D. KAJIAN TEORI

1. Komunikasi Massa

Secara umum komunikasi massa sebenarnya merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi pembagi dalam menyebarluaskan pengalamannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak.

Prosesnya memiliki satu unsur yang istimewa yaitu penggunaan saluran. Teknologi pembagi atau media dengan massa yang disebut saluran itu dipergunakan untuk mengirimkan pesan yang melintasi jarak jauh misalnya buku, pamflet, majalah, surat kabar, televisi, dan bahkan saat ini ditambah lagi dengan komputer serta aplikasinya dengan jaringan telepon serta satelit.

Jadi sebenarnya komunikasi massa menurut Severin 1977; Tan, 1981 dan Wright 1986; merupakan bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek-efek tertentu.¹⁸

Ciri komunikasi massa¹⁹ :

a. Sifat komunikan

Komunikasi massa ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar, heterogen dan anonim.

b. Sifat media massa

Sifat media massa ialah serempak cepat. Yang dimaksudkan dengan keserempakan (*simultaneity*) di sini ialah keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. Pada saat yang sama media massa dapat membuat khalayak secara serempak

¹⁸ Drs. Alo Liliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 36

¹⁹ Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Dinamika Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 51

menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan seorang komunikator.

Lain daripada itu, sifat media massa adalah cepat (*rapid*) dalam arti kata memungkinkan pesan yang disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang cepat.

c. Sifat pesan

Sifat pesan melalui media massa ialah umum (*public*). Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi melalui media massa sifatnya umum, maka lingkungannya menjadi universal, mengenai segala hal, dan dari berbagai tempat di seluruh jagat.

Sifat lain dari pesan media massa adalah sejenak (*transient*), hanya untuk sajian seketika.

d. Sifat komunikator

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator pada komunikasi massa, seperti wartawan, sutradara, penyiar radio atau penyiar televisi, adalah komunikator terlembagakan (*institutionalized communicator*).

Media massa merupakan organisasi yang rumit. Pesan-pesan yang sampai kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif. Karena berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan oleh berbagai faktor yang terdapat di dalam organisasi media massa.

e. Sifat efek

Efek komunikasi yang timbul pada komunikan bergantung kepada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar komunikan hanya tau saja, atau agar komunikan berubah sikapnya dan pandangannya, atau agar komunikan berbuah tingkah lakunya.

Sedangkan fungsi komunikasi massa adalah ²⁰:

- a. Menyiarkan informasi (*to inform*)
- b. Mendidik (*to educate*)
- c. Menghibur (*to entertain*)

Dari ketiga fungsi tersebut, mana yang utama, bergantung kepada jenis media massa. Fungsi utama dari surat kabar adalah menyiarkan informasi. Kalau ada fungsi-fungsi lainnya, hanyalah fungsi pelengkap saja terhadap fungsi utama menyiarkan informasi. Ada sementara ahli yang menambahkan fungsi lain terhadap fungsi media massa ini, umpamanya saja fungsi mempengaruhi (*to influence*), fungsi membimbing (*to guide*), fungsi mengkritik (*to critise*) dan lain-lain. Tapi itu semua hanya merupakan tambahan saja terhadap ketiga fungsi tadi, yaitu menyiarkan informasi, mendidik dan menghibur.

Dennis McQuail dalam buku *Teori Komunikasi Massa*-nya mengungkapkan fungsi utama media baik bagi masyarakat maupun bagi

²⁰ Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Dinamika Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 54

individu. Yang intinya hampir sama dengan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi utama media bagi masyarakat yaitu²¹ :

1. Informasi

- Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia
- Menunjuk hubungan kekuasaan
- Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan

2. Korelasi

- Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi
- Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan
- Melakukan sosialisasi
- Mengkoordinasi beberapa kegiatan
- Membentuk kesepakatan
- Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif

3. Kesenambungan

- Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (*subculture*) serta perkembangan budaya baru
- Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai

4. Hiburan

- Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi
- Meredakan ketegangan sosial

5. Mobilisasi

- Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama

Sementara itu fungsi media massa bagi individu menurut McQuail dan kawan-kawan (1972) yakni²² :

1. Informasi

- Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia
- Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan
- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum
- Belajar, pendidikan diri sendiri
- Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan

2. Identitas pribadi

- Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi
- Menemukan model perilaku
- Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media)
- Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri

3. Integrasi dan interaksi sosial

- Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain; empati

sosial

- Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki
- Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial
- Memperoleh teman selain dari manusia
- Membantu menjalankan peran sosial
- Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanak-keluarga, teman dan masyarakat

4. Hiburan

- Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan
- Bersantai
- Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis
- Mengisi waktu
- Penyaluran emosi

2. Pers

Istilah pers, atau press berasal dari istilah Latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak.²³ Berdasar leksikon komunikasi, pers bisa berarti: (1) usaha percetakan atau penerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi; (4) orang-orang yang bergerak

²³ Samsul Wahidin, *op.cit*, hal. 35.

dalam penyiaran berita; (5) medium penyiaran berita, yakni surat kabar, majalah, radio, dan televisi.²⁴

Julius Caesar dianggap sebagai salah seorang yang memulai merintis pers karena secara teratur Raja Romawi kuno itu mengumumkan hasil rapat senator dalam pemerintahannya, pada papan pengumuman di beberapa tempat agar diketahui rakyatnya. Pengumuman itulah yang kemudian disebut sebagai “*Acta Diurna*”. Istilah pers dalam pengertian surat kabar berasal dari Eropa ketika para pedagang di sana saling tukar informasi harga pasar yang ditulis pada kulit kayu atau kulit ternak.²⁵

Pengertian lain mengenai pers terbagi menjadi dua macam, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.²⁶

Sedangkan pers berfungsi untuk²⁷ :

- 1) Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi dan konsiderasi tentang masalah-masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.

²⁴ Totok Djuroto, *op.cit.*, hal. 4.

²⁵ Totok Djuroto, *loc.cit.*

²⁶ Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 17. *commit to user*

²⁷ *Ibid*, hal 22.

- 2) Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri.
- 3) Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai *watchdog* (anjing penjaga) terhadap pemerintah.
- 4) Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan.
- 5) Memberikan hiburan (dengan mana hanya hiburan yang “baik” yang dimaksudkan, apa pun hiburan itu).
- 6) Memelihara otonomi di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.²⁸

Sementara itu Samsul Wahidin dalam bukunya *Hukum Pers* menyebutkan empat fungsi pers Indonesia itu, yaitu ²⁹ :

- a) Menyebarkan informasi
- b) Melakukan kontrol sosial yang konstruktif
- c) Menyalurkan aspirasi rakyat
- d) Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat

Sejak bangkitnya era reformasi pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, pers di Indonesia menikmati kebebasannya yang selama hampir 32 tahun disumbat. Kebebasan ini ditandai dengan dicabutnya peraturan mengenai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Dengan dicabutnya SIUPP, otomatis pendirian perusahaan pers menjadi semakin mudah.

Sejalan dengan dihapusnya SIUPP, pers Indonesia kemudian berkembang pesat bak jamur di musim hujan. Siapa saja bisa menerbitkan koran, tabloid, majalah dan media lain, tanpa harus melewati aturan yang berbelit, cukup dengan membentuk badan usaha. Maka bermunculanlah berbagai macam media cetak dengan bermacam isi, termasuk surat kabar.

Sebagai media massa cetak, surat kabar harus mempunyai karakteristik, yaitu ³⁰:

- a. Publisitas : bahwa isi pesan harus bersifat umum, dalam arti semua dapat membacanya.
- b. Periodesitas : bahwa surat kabar diterbitkan secara periodik dan teratur.

²⁹ Samsul Wahidin, *op.cit*, hal. 59.

³⁰ Onong U. Effendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 98.

- c. Universalitas : kesempurnaan isi, beraneka ragam dan dari seluruh dunia.
- d. Aktualitas : bahwa isi pesan harus sesuatu yang baru dan hangat.
- e. Kontinuitas : bahwa isi pesan harus berkesinambungan dan terus menerus, selama masih menjadi perhatian khalayak luas.

Secara keseluruhan isi penerbitan pers dapat dilihat sebagai berikut:³¹

1. Pemberitaan (*news getter*)
 - a. Pengertian berita (*perception news*)
 - b. Berita langsung (*straight news*)
 - c. Penggalan berita (*investigative news*)
 - d. Pengembangan berita (*depth news*)
 - e. Feature (*human interest news*)
2. Pandangan atau Pendapat (*opinion*)
 - a. Pendapat masyarakat (*public opinion*)
 - 1) Komentar
 - 2) Artikel
 - 3) Surat Pembaca
 - b. Opini Penerbit (*press opinion*)
 - 1) Tajuk Rencana
 - 2) Pojok

³¹ Totok Djuroto, *op.cit*, hal 46.

3) Karikatur

3. Periklanan (*advertising*)

- a. Iklan display
- b. Iklan baris
- c. Iklan pariwisata (*advertorial*)

Pada dasarnya salah satu fungsi pers adalah sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai kewajiban moral untuk melayani dan memajukan masyarakat. Namun di sisi lain, pers juga memiliki kepentingan bisnis yang tentunya bersifat komersial, yaitu sebagai lembaga yang harus mampu menjaga agar tetap eksis dalam masyarakat. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan bisa mempengaruhi masyarakat karena ia bertindak sebagai komunikator massa. Agar dipercaya masyarakat, pers berupaya menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru. Tetapi masyarakat sebagai konsumen pers, sangat selektif memilih informasi. Jika penyajian pers tidak sesuai dengan keinginannya, jangankan dibeli, dibaca pun tidak. Minat baca masyarakat terhadap produk pers sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers itu sendiri.³²

Pers sebagai lembaga kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Apalagi bagi pemerintah yang banyak melakukan kesalahan dan ketidakbenaran, kontrol sosial pers terasa sangat pedih dan seringkali menggoyahkan kelangsungan pemerintahannya. Tetapi pemerintah juga

³² Totok Djuroto, *op.cit*, hal 6.

mampu mempengaruhi pers dengan cara memasang rambu-rambu berupa peraturan dan perundangan agar pers bisa ditundukkan.³³

Kontrol sosial pers merupakan salah satu fungsi pers yang sangat penting terutama di negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial selanjutnya dinyatakan tegas oleh pemerintah dalam UU Pers No.40 tahun 1999. Melalui pasal 3 ayat (1), pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itu berarti selain sebagai media yang memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi, pers juga memikul tanggung jawab sebagai penjaga demokrasi dengan aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan di manapun ia berada.

3. Tajuk Rencana

Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca.³⁴

Tajuk rencana adalah suatu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, tabloid, atau majalah. Ada yang menyebut tajuk rencana sebagai "Catatan redaksi", bahasa populernya Editorial. Sebelum

³³ Totok Djuroto, *loc.cit.*

³⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Tajuk_rencana diakses 21/06/10/22:29

ada istilah tajuk rencana, koran - koran kuno menamakan penerbitan ini sebagai “induk karangan” yang diterjemahkan dari bahasa Belanda “*Hoofd Artikel*”. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*Leader*”.

Lyle Spencer dalam bukunya yang berjudul “*Editorial Writing*” mengemukakan batasan tajuk rencana sebagai pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa, sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan tadi.³⁵ Dari batasan Spencer yang dikutipkan tersebut jelas sekali bahwa tajuk rencana berisi pendapat, harus logis dan ditulis secara menarik namun singkat, serta bertujuan untuk mempengaruhi pendapat.

Pendapat lain menyebutkan tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan.

Senada dengan hal tersebut, Assegaf menyatakan umumnya pada surat kabar tanah air, pemimpin redaksi berfungsi sebagai penulis tajuk rencana (Editorial). Karena itu tajuk rencana surat kabar sering pula

merupakan pencerminan watak dari sang pemimpin redaksi. Melalui sebuah tajuk rencana, akan terlihat bahwa pers menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan yang dilakukan erat kaitannya dengan fungsi perubahan sosial (*social change*).³⁶

Karena suara tajuk rencana bukan suara perorangan atau pribadi melainkan suara kolektif seluruh wartawan dan karyawan dari suatu lembaga penerbitan pers, maka apa pun yang dibahas atau diulas, tajuk rencana tidak boleh mengesampingkan pendapat redaksi. Selain itu tajuk tidak bisa mengupas suatu kejadian yang sudah lama berlangsung. Tajuk juga menggambarkan falsafah dan pandangan hidup dari penerbitnya. Sikap itu bisa eksplisit atau implisit.³⁷

Dalam penulisan tajuk rencana, para redaktur surat kabar bisa bersikap sebagai berikut³⁸:

1. Bersifat '*favorable*' apabila isinya mendukung dan menyetujui suatu masalah atau kejadian yang sedang aktual dan penting pada zamannya.
2. Bersifat '*unfavorable*' apabila menentang atau tidak menyetujui suatu masalah atau kejadian yang sedang aktual pada zamannya.
3. Bersifat '*netral*' apabila hanya memberi informasi tentang suatu masalah atau peristiwa, tanpa memberikan penilaian, sikap, dan

³⁶ <http://azteza.wordpress.com/2009/07/23/wacana-teks-media-massa-pada-isu-kebebasan-berpendapat-dalam-tajuk-rencana-harian-kompas/>

³⁷ Totok Djuroto, *op.cit*, hal. 78. *commit to user*

³⁸ Redi Panuju, *Nalar Jurnalistik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.81

pandangannya terhadap masalah atau peristiwa yang dinilai penting itu.

Suherman dalam buku *Jurnalisme Kontemporer* mengajukan beberapa unsur penting dalam tajuk rencana. Yang pertama adalah fakta. Fakta menjadi faktor penting. Berdasar fakta, berbagai opini tajuk rencana dibuat. Gambaran permasalahan dideskripsikan, dan dicarikan atau diusulkan jalan keluarnya. Tanpa landasan fakta, pendapat (opini) sebuah media akan dinilai sebagai fitnah. Yang rugi bukan hanya pihak yang difitnah oleh sebuah tajuk, tapi media si pembuat tajuk itu akan rugi, kehilangan kredibilitas profesionalismenya.

Yang kedua interpretasi. Interpretasi menjadi proses penting lain. Menurut Kamus Komunikasi, susunan Onong U Effendy (1989:189), interpretasi adalah proses memadukan kegiatan memahami suatu fenomena dengan kegiatan mengungkapkan, menerangkan, dan menerjemahkannya menjadi suatu pesan yang siap untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Terakhir adalah opini. Opini di sini merupakan pernyataan media terhadap persoalan yang tengah dibahasnya. Melalui pernyataan-pernyataannya, sikap sebuah media terlihat.³⁹

Umumnya para ahli menyebutkan ada empat fungsi tajuk rencana, yakni⁴⁰ :

1. Menjelaskan berita. Dalam fungsi ini penulis tajuk rencana bertindak sebagai seorang guru yang menjelaskan sesuatu berita atau peristiwa.

³⁹ Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 66.

⁴⁰ Dja'far H. Assegaff, *op.cit*, hal. 64.

Dalam hal-hal pemberitahuan tentang kebijakan yang diambil, penulis tajuk rencana akan menjelaskan apa arti kebijakan yang diambil dan apa akibatnya kepada masyarakat. Penulisan tajuk rencana bebas memberikan interpretasinya untuk menjelaskan suatu berita kepada masyarakat pembaca.

2. Mengisi latar belakang. Dalam fungsi kedua ini tajuk rencana berfungsi untuk memberikan kaitan suatu berita dengan kenyataan-kenyataan sosial lainnya. Si penulis tajuk rencana dapat melengkapi berita tadi dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan memberikan bahan-bahan tambahan yang dikuasai si penulis tajuk rencana, pembaca akan dapat lebih memahami suatu berita dalam cakrawala baru dan facet-facet yang tadinya tidak terlihat.
3. Meramalkan masa depan. Dalam fungsi ketiga ini, si penulis tajuk rencana menjadi futuris dengan analisisnya mencoba memberikan ramalan apa yang akan terjadi dan karena itu dapat berjaga-jaga atau memanfaatkan sesuatu di masa depan.
4. Meneruskan suatu penilaian moral. Sejak lama terdapat anggapan bahwa penulis tajuk rencana mencerminkan apa yang terasa oleh hati nurani masyarakat. Karena itu penulis tajuk rencana diharapkan memihak dan memberikan penilaian dan argumentasi atas penilaiannya. Dalam fungsi yang keempat ini, seorang penulis tajuk rencana memberikan penilaian dan sikapnya atas sesuatu kejadian.

Semua itu merupakan berbagai fungsi yang sekaligus menunjukkan tujuan tajuk rencana. Berbagai fungsi itu, di dalam tajuk, disampaikan melalui materi-materi tertentu. Misalnya melalui materi yang berisi informasi, materi yang memaparkan peristiwa aktual.

Materi tajuk bisa pula menjelaskan, penjelasannya merincikan permasalahan, serta interpretasi tertentu. Materi tajuk bisa bersifat argumentatif, penulisnya melakukan penganalisaan dengan berlandaskan alasan-alasan yang ditopang oleh data dan fakta yang akurat, serta memaparkan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “apa akibatnya”. Materi tajuk bisa membujuk, tajuk jenis ini mengajak berbagai pihak untuk merespons peristiwa yang tengah terjadi, dengan cara persuasif atau agitatif. Materi tajuk bisa memuji, tajuk jenis ini berisi penghargaan kepada kelompok atau pihak tertentu yang dinilai berhasil melakukan suatu kegiatan, atau berjasa kepada masyarakat. Materi tajuk bisa menghibur, tajuk ini mencoba menghibur masyarakat, baik ketika ditimpa kemalangan, bencana sosial, atau pun penderitaan tertentu. Humor atau lelucon bisa dipakai guna mengajak masyarakat memperhatikan sebuah fenomena sosial yang luput dari wacana publik.⁴¹

Don Michael Flournoy juga menjelaskan tentang beberapa jenis tajuk rencana. Yaitu tajuk rencana yang bersifat argumentatif, informatif dan aneka rupa. Tajuk rencana yang bersifat argumentatif adalah yang membela suatu pandangan tertentu. Tajuk rencana ini dibuat untuk

⁴¹ Septiawan Santana K, *op.cit*, hal 69. *commit to user*

membahas dan menganalisa baik buruknya sesuatu dampak atau pengamalan sesuatu kebijaksanaan atau kegiatan, dan disusun untuk mengajak pembaca. Argumen-argumen yang diajukan melalui tajuk rencana bisa berupa imbauan jelas untuk bertindak atau isyarat untuk menggiring pembaca ke arah jalan pikiran yang dikehendaki oleh sang redaktur.⁴²

Tajuk bersifat informatif merupakan usaha sang redaktur untuk memberikan kepada para pembacanya keterangan-keterangan latar belakang sesuatu hal atau masalah tertentu. Jenis tajuk ini juga dinamakan tajuk bersifat interpretasi, penjelasan atau penggelaran.

Sedangkan tajuk aneka rupa adalah tajuk yang berusaha untuk menghibur atau mengasyikkan pembaca dan bukan memberikan semacam interpretasi tentang kejadian yang bernilai berita atau upaya mempengaruhi. Tajuk jenis ini biasanya berfungsi untuk meringankan halaman tajuk.

Sementara itu Rizal Malarangeng membagi tajuk rencana ke dalam tiga model, yakni⁴³:

1. Tajuk Model Jalan Tengah (MJT). Walaupun mengandung unsur-unsur kritis, sering ditulis sedemikian rupa sehingga terkesan terlalu santun, berputar-putar dan cenderung mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. Tajuk seperti itu terkesan ingin menghindari konfrontasi langsung dengan pihak yang diulas atau dikritiknya.

⁴² Don Michael Flournoy (Ed.), *Analisis Isi Surat kabar Surat kabar Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1989, hal. 129. *commit to user*

⁴³ St Sularto dalam *Humanisme Dan Kebebasan Pers*, Redi Panuju, *op.cit*, hal.81.

2. Tajuk Model Angin Surga (MAS). Hampir serupa , hanya ia ditujukan bukan untuk menggugat atau mempertanyakan hal-hal tertentu. Oleh penulisnya, tajuk model ini ditulis lebih sebagai imbalan serta harapan. Di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan kunci, antara lain “kebersamaan”, “duduk bersama mencari solusi”, “kewajiban moral”, “kewajiban kita semua”, dan semacamnya.
3. Tajuk Model Anjing Penjaga (MAP). Di dalamnya dapat terbaca dengan jelas apa yang hendak diperjuangkan dan dikatakan oleh penulisnya. Dengan lugas, berani, tajam, kritik-kritik yang ada di dalamnya, bahkan ditujukan kepada pemegang kekuasaan tertinggi di republik kita. Tajuk seperti itulah yang betul-betul menjalankan kodrat media pers sebagai lembaga kontrol dan pemberi informasi yang mendidik dan mencerdaskan pembaca.

Tom E. Rolnicki, C. Dow Tate, dan Sherri A. Taylor dalam buku *Pengantar Dasar Jurnalisme* pun membagi tajuk rencana/ editorial menjadi beberapa jenis. Yang pertama Editorial Advokasi yaitu editorial yang menginterpretasikan, menjelaskan dan membujuk serta mendukung perubahan, biasanya dihubungkan dengan suatu berita yang ada di dalam koran tersebut. Editorial ini akan memberi tahu pembacanya mengapa kejadian-kejadian itu penting. Ia juga bisa menjelaskan signifikansi term dan isu, mengidentifikasi sosok dan faktor dan menerangkan latar belakang historis, kultural, geografis, dan kondisi lainnya. Usaha penulis

untuk membujuk pembaca menerima interpretasi tertentu atau kesimpulan tertentu bisa jadi dilakukan dengan halus dan terselubung.⁴⁴

Editorial yang menginterpretasikan, menjelaskan atau membujuk juga dapat mengkaji motif orang yang terkait dengan isu atau kejadian yang didiskusikan berdasarkan konsekuensi dari berbagai tindakan. Melalui interpretasi berita atau penjelasan gagasan atau kondisi, redaksi membujuk pembaca agar setuju dengan pandangan mereka. Editorial dapat mempromosikan atau mendukung perubahan. Fakta disajikan dengan jelas, dan alasannya disampaikan secara logis kepada pembaca agar editorial berhasil mencapai tujuannya. Editorial mungkin juga menawarkan solusi dan rekomendasi aksi. Akan tetapi, tidak semua nada editorial mesti positif atau berupa kritik komprehensif.

Yang kedua yakni Editorial Pemecahan Masalah. Terkadang dinamakan 'editorial kritik', tipe editorial ini dipakai saat redaksi ingin menarik perhatian pada suatu problem atau ingin mengkritik tindakan seseorang. Karena surat kabar perlu bertindak secara bertanggungjawab, maka fakta harus disajikan untuk mendukung kritik atau untuk menjelaskan sebab-sebab masalah, dan solusi harus ditawarkan. Proses tiga langkah ini mirip dengan metode ilmiah: pernyataan problem, penyajian bukti dan kesimpulan dengan usulan solusi.⁴⁵

Kritik harus dikemukakan dengan hati-hati. Dalam editorial, adalah *fair* untuk mengkritik tindakan seseorang jika tindakan mereka berdampak

⁴⁴ E. Rolnicki, Tom, C. Dow Tate, Sherri A. Taylor, *Pengantar Dasar Jurnalisme*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 135.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 139.

pada orang lain, adalah tidak *fair* mengkritik karakteristik fisik seseorang atau tindakan seseorang yang murni pribadi. Pembaca akan mengabaikan tuduhan tanpa bukti kuat. Karena mengekspresi opini, penulis editorial punya lebih banyak kebebasan ketimbang penulis berita dalam kaitannya dengan isu *libel* (pencemaran nama baik). Akan tetapi, bahasa yang ofensif juga tidak akan efektif dan membahayakan kredibilitas koran. Kebohongan dan ketidakjujuran adalah tidak etis.⁴⁶

Dalam editorial pemecahan masalah atau editorial kritik, bobot problem, kualitas bukti dan kepraktisan solusi akan mempengaruhi kesuksesannya dalam menarik pembaca. Penulis editorial harus memilih problem yang signifikan dan menawarkan solusi yang riil.⁴⁷

Yang ketiga adalah Editorial Penghargaan. Biasanya editorial penghargaan akan memuji seseorang atau satu organisasi yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam editorial ini alasan pujian harus dijelaskan dan dampak dari prestasi itu juga harus dimuat. Editorial ini tidak akan lazim kecuali orang yang berprestasi itu benar-benar mempengaruhi banyak orang.⁴⁸

Kekuatan pers, seperti yang diekspresikan lewat editorial, dapat dipakai untuk mendukung atau mengkritik. Dengan adanya kekuatan ini, maka ia harus digunakan secara bertanggungjawab demi kebaikan pembaca dan komunitas yang dilayani koran. Tajuk rencana juga bisa mengkritik, mempertanyakan, mendukung atau bahkan mencela keputusan

⁴⁶ E. Rolnicki, Tom, C. Dow Tate, Sherri A. Taylor, *loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid*, hal. 140. *commit to user*

⁴⁸ E. Rolnicki, Tom, C. Dow Tate, Sherri A. Taylor, *op.cit*, hal. 142.

yang diambil oleh penguasa, atau pemikiran yang timbul di tengah masyarakat. Karena itu, tidak jarang jika tajuk rencana dipakai oleh aparat pengambil keputusan untuk menentukan langkah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Sementara itu kriteria untuk topik tajuk rencana adalah ⁴⁹ :

1. Topik merujuk pada berita yang aktual atau kontroversial
2. Topik sesuai dengan filosofi, visi, misi, dan kebijakan umum media penerbitan pers
3. Topik sejalan dengan kualifikasi dan fokus wilayah sirkulasi media penerbitan
4. Topik berpijak pada kaidah dan nilai standar jurnalistik seperti aktualitas, objektivitas, keluarbiasaan, dan prinsip peliputan berimbang.
5. Topik tidak bertentangan dengan aspek ideologis, yuridis, sosiologis, dan etis yang terdapat dalam masyarakat atau bangsa.
6. Topik senantiasa berorientasi pada nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Pada tahun 1974, diselenggarakan Konferensi Nasional Para Penulis Tajuk. Isinya menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan para penulis tajuk ⁵⁰ :

⁴⁹ Denoan, Rangkuman Buku “Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis Profesional”, <http://catatancalonwartawan.wordpress.com/2009/03/10/rangkuman-buku-%E2%80%9Cmenulis-artikel-dan-tajuk-rencana-panduan-praktis-penulis-dan-jurnalis-profesional%E2%80%9D/> diakses 21/06/10/23:38 *o user*

⁵⁰ Santana K, *op.cit*, hal 72.

- a) Penulis tajuk harus menyajikan fakta-fakta yang jujur dan tuntas. Tidak salah mengarahkan pembacanya, tidak salah memaparkan situasinya atau tidak menyudutkan seseorang dengan dasar pandang yang salah.
- b) Penulis tajuk harus mengambil kesimpulan obyektif berdasar fakta-fakta, bobot bukti dan konsep yang valid.
- c) Penulis tajuk tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Atau, memanfaatkan pengaruh tertentu untuk kepentingan pribadi. Ia tidak boleh menyelewengkan integritasnya.

Sedangkan sifat dari tajuk rencana adalah :

1. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya bisa harian (*daily*), atau mingguan (*weekly*), atau dua mingguan (*biweekly*) dan bulanan (*monthly*).
2. Isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas baik itu aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, atau olah raga bahkan *entertainment*, tergantung jenis liputan medianya.
3. Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur, kepada para pembacanya terkait sikap dari media massa yang menulis tajuk rencana.
4. Terkait erat dengan *policy* media atau kebijakan media yang bersangkutan. Karena setiap media mempunyai perbedaan iklim

tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam, yang menaungi media tersebut.

Edgar P. Trotter dalam “*Content Analysis of the Editorials of the Nine Largest Kentucky Daily Newspaper*” (Tesis Sarjana, Ohio University, 1967) melihat bahwa surat kabar-surat kabar cenderung untuk mencadangkan masalah-masalah nasional bagi komentar tajuk rencana, dengan kurang komentar terhadap masalah-masalah negara dan setempat. Politik dan pemerintah merupakan kategori-kategori subyek yang paling populer. Ia juga melihat bahwa para penulis tajuk menggunakan lebih banyak model tajuk informasi daripada model tajuk argumentasi.⁵¹

Kategori-kategori subyek yang dimaksud adalah kategori Deutschmann yang digunakan untuk menganalisa isi persuratkabaran di Indonesia, yakni 1) perang, pertahanan dan diplomasi, 2) politik dan pemerintah, 3) kegiatan ekonomi, 4), kejahatan, 5) masalah-masalah moral masyarakat, 6) kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 7) kecelakaan dan bencana, 8) ilmu dan penemuan, 9) pendidikan dan seni klasik, 10) hiburan rakyat, dan 11) *human interest*.⁵²

4. Wacana

Banyak sekali definisi wacana yang dilontarkan oleh para ahli. Salah satunya adalah definisi wacana yang dikemukakan oleh Jusuf Syarif Badudu. Menurut Badudu, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan,

⁵¹ Don Michael Flournoy (Ed.). *op.cit* hal. 16.

⁵² Don Michael Flournoy (Ed.), *loc.cit*.

yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu ⁵³. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa wacana merupakan kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan dan tertulis.

Dalam pengertian linguistik, wacana adalah kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa. Oleh karena itu wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Selain dibangun atas hubungan makna antarsatuan bahasa, wacana juga terikat dengan konteks. Konteks inilah yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi. Menurut Hawthorn (1992) wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Sedangkan Roger Fowler (1977) mengemukakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termasuk di dalamnya. Foucault memandang wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan, kadang kala sebagai sebuah

⁵³ Jusuf Syarif Badudu dalam Drs. Sumarlam dkk, *Teori dan Praktik Analisis Wacana*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2005, hal. 14

individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai sebuah praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

James Desse dalam karyanya *Thought into Speech: The Psychology of a Language*, mengatakan bahwa sebuah wacana harus memenuhi syarat sebagai berikut ⁵⁴.

1. Merupakan seperangkat proposisi, yaitu konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi dari pembicara.
2. Isi komunikasi itu harus saling berhubungan, artinya antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain saling berkaitan.
3. Keterkaitan antarproposisi itu menghasilkan rasa kepaduan, baik kepaduan bentuk maupun kepaduan makna.

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana berusaha menjelaskan terjadinya sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Oleh karena itulah, ia dinamakan analisis wacana. ⁵⁵

Secara singkatnya, dapat dirumuskan bahwa analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa.

Lebih jauh, Syamsuddin menjelaskan bahwa dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana adalah sebagai berikut, *pertama*, analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat. *Kedua*, analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks

⁵⁴ James Desse, dalam Drs. Sumarlam dkk, *Teori dan Praktik Analisis Wacana*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2005, hal. 6.

⁵⁵ Heryanto dalam Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 46.

dan situasi. *Ketiga*, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. *Keempat*, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa. *Kelima*, analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional. Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman dan pemaknaan bahasa menjadi suatu point yang paling penting.⁵⁶

5. Kasus Bibit - Chandra

Kasus ini bermula dari ditahannya Yusuf Erwin Faisal, mantan ketua Komisi IV DPR oleh KPK karena diduga menerima uang suap alih fungsi lahan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 16 Juli 2008, dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan ruang kerja Yusuf di gedung PT Masaro Radiokom di Jalan Talang Betutu 11-A, Jakarta Pusat oleh KPK pada 29 Juli 2008. Lalu pada tanggal 30 Juli 2008, setelah penggeledahan tersebut, KPK menemukan kasus baru, yakni dugaan korupsi pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Yusuf dan Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo. Pada tanggal 4 Mei 2009 Antasari Azhar yang saat itu merupakan Ketua KPK (non aktif) ditahan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Pada 4 Agustus 2009 testimoni Antasari Azhar beredar. Isinya menyudutkan para komisioner KPK lainnya. Antasari dalam testimoninya

commit to user

⁵⁶ *Ibid*, hal. 49-50.

menuding ada dugaan suap terkait kasus yang ditangani KPK. Antasari diketahui menemui tersangka korupsi SKRT Anggoro Widjojo di Singapura. Pada 11 Agustus 2009 KPK melaporkan pembuatan surat pencabutan cekal palsu ke Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan beredarnya surat cekal palsu itu. Polisi menahan Ari Muladi terkait penerimaan dana dari PT Masaro pada 19 Agustus 2009. Dia dikenai pasal penipuan dan penggelapan. Ari awalnya mengaku sebagai orang yang memberikan suap ke pimpinan KPK. Ini dia sebut dalam dokumen 15 Juli. Namun kemudian dia mencabutnya, dan mengaku tidak kenal pimpinan KPK.

Pada 11 September 2009 polisi memeriksa 4 pimpinan KPK atas laporan Antasari Azhar. Mereka yakni Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin dan Haryono Umar. Kemudian pada 15 September 2009 polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Pasal penyalahgunaan wewenang dan pemerasan disangkakan pada keduanya. Pada 16 September 2009 Chandra dan Bibit dikenakan wajib lapor, tidak ditahan. Tanggal 29 Oktober 2009 Mabes Polri mengumumkan penahanan Chandra dan Bibit, dengan alasan dikhawatirkan menggalang opini dengan menggelar jumpa pers. Kemudian Chandra dan Bibit ditahan di Rutan Bareskrim Polri, saat melakukan wajib lapor. Sebelumnya mereka mengikuti sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

E. KERANGKA KONSEP DAN PEMIKIRAN

1. Kerangka Konsep

a. Pandangan Media

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pandangan diartikan penglihatan dalam waktu tetap dan agak lama.⁵⁸ Dalam penerbitan suatu pers, salah satu komponennya adalah pandangan atau pendapat. Pandangan atau pendapat ini disebut opini.⁵⁹ Pandangan media (sering juga disebut opini/ pendapat pers) yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimana Harian Kompas memandang kasus Bibit Chandra yang diungkapkan melalui tajuk rencana yang merupakan sarana bagi suatu media untuk berpendapat.

b. Tajuk rencana

Tajuk rencana adalah karangan pokok dalam surat kabar yang mengulas masalah penting, misalnya masalah politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Tajuk rencana ini berbeda dari berita biasa karena mengandung opini serta pencerminan garis pandangan surat kabar itu.

Sikap atau pendapat dari media yang diwacanakan dalam tajuk rencana bisa memiliki tiga kemungkinan, yaitu apakah sependapat dengan pihak penguasa (baca: pemerintah), netral atau berlawanan dengan penguasa. Hal ini dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi sosial politik di negara tersebut, juga hubungan antara negara dan

⁵⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hal 256.

⁵⁹ Drs. Totok Djuroto, M. Si, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 46.

masyarakatnya. Meskipun secara ideologis dan historis pers selalu berpihak kepada rakyat, namun seringkali karena faktor-faktor tertentu (misalnya tekanan dari pemerintah atau pemilik modal), pers cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat.

Ciri-ciri tajuk rencana yakni ⁶⁰:

1. Pengungkapan dengan gaya bahasa yang sederhana dan jelas
2. Tujuannya memberikan bimbingan moral pembaca
3. Penulisan disertai pertimbangan yang singkat
4. Mempunyai daya untuk mempengaruhi opini publik

Sedangkan pola baku penulisan tajuk rencana antara lain :

1. Judul yang mengimbau pembaca
2. Kalimat untuk *lead* yang tidak perlu dibuang
3. Kalimat paragraf terakhir yang menggemakan judul dan *lead* serta mempertegas problema yang dikupas

Sementara itu unsur struktural tajuk rencana bisa diuraikan sebagai berikut ⁶¹:

- a. Fakta sebagai titik tolak pengembangan ide penulis yang bersifat mengkritik atau membela
- b. Ide/ pandangan/ pendapat penulis
- c. Data dan fakta pendukung ide penulis
- d. Kesimpulan
- e. Saran dan jalan keluar

⁶⁰ Y S Gunadi, *Himpunan Istilah Komunikasi*, PT Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 15.

⁶¹ *Ibid*, hal. 116.

c. Analisis Wacana

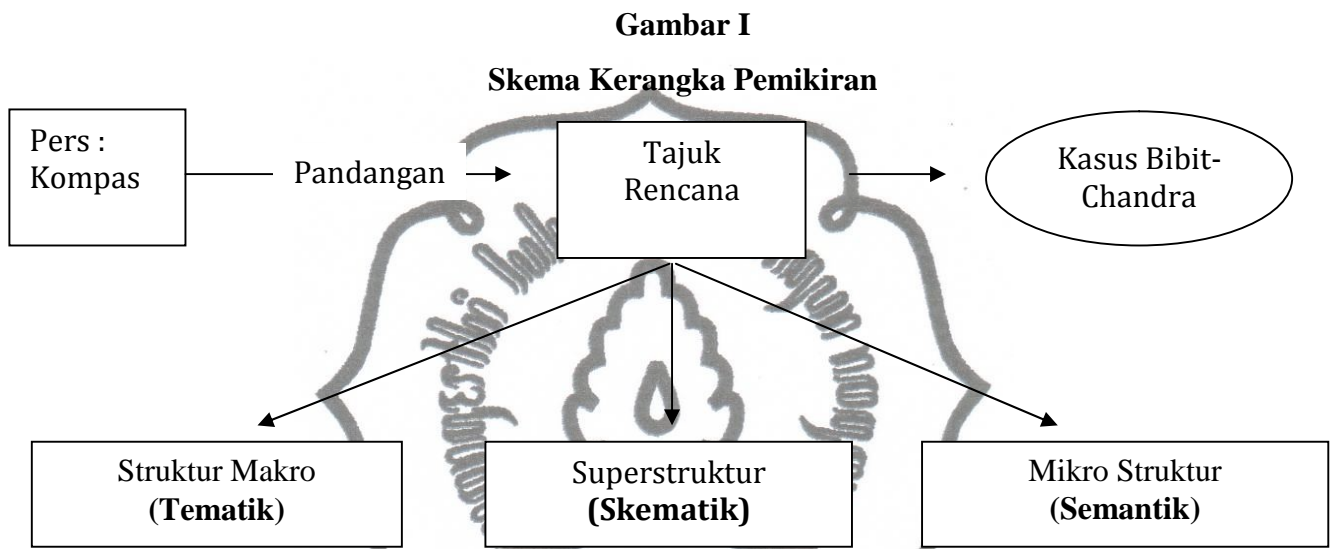
Teori wacana berusaha menjelaskan terjadinya sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Oleh karena itulah, ia dinamakan analisis wacana. Analisis wacana adalah ilmu yang baru muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Secara singkatnya, dapat dirumuskan bahwa analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa.

Teori wacana dalam tradisi filsafat sudah sangat tua. Namun menjadi aktual kembali dalam diskusi filsafat kontemporer dengan munculnya strukturalisme yang berpendapat bahwa arti bahasa tidak tergantung dari maksud pembicara atau pendengar ataupun dari referensinya pada kenyataan tertentu, arti bergantung pada struktur bahasa itu sendiri. Yang dimaksud struktur di sini adalah jaringan hubungan intern elemen-elemen terkecil bahasa yang membentuk suatu kesatuan otonom yang tertutup.⁶²

2. Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diperlukan kerangka pemikiran untuk menjadi rambu-rambu berdasarkan teori relevan yang mencakup pokok-pokok pikiran yang menggambarkan sudut permasalahan yang akan diteliti.

Dari kajian teori, kerangka konsep dan permasalahan yang coba dianalisa, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran dalam sebuah skema berikut ini:



Dari skema di atas dapat dijelaskan dan digambarkan bahwa pers (dalam penelitian ini adalah Harian Kompas) mengungkapkan pandangan dan opininya melalui tajuk rencana yang berkaitan dengan Kasus Bibit-Chandra dimana kasus ini merupakan kasus pemberantasan korupsi “terramai” tahun 2009 yang lalu. Di sini pula KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia sedang terusik eksistensinya. Dalam tajuk rencana yang dimuatnya, sikap dan pendapat Kompas mengenai pemberantasan korupsi tercantum.

Kemudian untuk menganalisa teks tajuk rencana yang dituliskan oleh Kompas, penulis mengadaptasi struktur wacana dari Teun A. van Dijk, seorang pengajar di Universitas Amsterdam. Van Dijk membagi

commit to user

suatu teks ke dalam tiga struktur atau tingkatan yang saling mendukung satu sama lain.⁶³

Pertama, struktur makro. Struktur ini merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu kolom, dalam hal ini adalah tajuk rencana yang dimuat oleh Harian Kompas.

Kedua, superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam kolom secara utuh.

Ketiga adalah struktur mikro. Yaitu makna wacana dapat diamati dari bagian kecil yang menyusun suatu teks, yakni kata, kalimat, proporsional, anak kalimat, parafrase, dan gambar.

Hal ini penting untuk mengetahui opini Kompas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yang mana menyiratkan pendapat pribadi institusi pers tersebut. Cara penggambaran hal-hal terkait pemberantasan korupsi tersebut pada akhirnya menunjukkan pandangan, pendapat dan sikap Kompas kepada pembaca. Hal itulah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari

⁶³ Eriyanto, *op.cit*, hal. 225-226. *commit to user*

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.⁶⁴

Penelitian kualitatif juga lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi.⁶⁵

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tajuk rencana terkait kasus Bibit-Chandra yang dimuat dalam surat kabar Kompas pada rentang waktu 1 Oktober – 31 Desember 2009.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis mendapatkan 8 judul dari tajuk rencana surat kabar Kompas yang akan diteliti, yakni :

Tabel I

**Tajuk Rencana Harian Kompas
Mengenai Kasus Bibit-Chandra**

Edisi	Judul
30 Oktober 2009	Penahanan yang Kontroversial
2 November 2009	Kenapa Jadi Begini
3 November 2009	Dukungan Dari Jagat Maya
6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media
6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan
10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar

⁶⁴ Drs. Jalaluddin Rakhmat, M. SC, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993, hal 24

⁶⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, Lkis, 2007, hal 35.

17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir
2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit-Chandra

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mengenal dua cara pokok untuk mengelompokkan data, yaitu dengan metode interaktif yang meliputi wawancara dan observasi serta metode non-interaktif yang meliputi observasi tak berperan dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang kedua yaitu metode non-interaktif.

Adapun data-data yang diperoleh akan dikategorikan sebagai data primer, yaitu data tajuk rencana terkait kasus Bibit-Chandra yang dimuat dalam surat kabar Kompas pada rentang waktu 1 Oktober – 31 Desember 2009.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan disini adalah aplikasi dari model analisa wacana yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Model ini dipilih lantaran dari segi kelengkapan memiliki bangunan struktur teks yang lebih lengkap dibanding model yang lain. Dengan demikian diharapkan mampu membongkar struktur wacana tajuk rencana secara lebih gamblang.

Model ini membagi teks menjadi tiga struktur. Ketiga struktur tersebut akan diuraikan sebagai berikut ⁶⁶:

<p>Struktur Makro Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks</p>
<p>Superstruktur Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan</p>
<p>Struktur Mikro Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.</p>

Tabel II
Aplikasi Teknik Analisa Wacana van Dijk

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	<p>Tematik Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita.</p>	Topik
Superstruktur	<p>Skematik Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh.</p>	Skema
Struktur Mikro	<p>Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain.</p>	Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	<p>Sintaksis Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.</p>	Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti

commit to user

⁶⁶ Eriyanto, *op.cit.*, hal. 227-229.

Struktur Mikro	<p style="text-align: center;">Stilistik</p> <p>Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.</p>	Leksikon
Struktur Mikro	<p style="text-align: center;">Retoris</p> <p>Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.</p>	Grafis, Metafora, Ekspresi

Sumber : Eriyanto, 2002 : 227-229

Di sini penulis hanya akan menggunakan tiga elemen analisis dari beberapa elemen analisis yang ada. Tiga elemen tersebut yakni : tematik, skematik, dan semantik.

Tematik menunjuk pada suatu gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan atau yang utama dari suatu teks. Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Topik menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan atau gagasan inti dari wartawan ketika melihat atau memandang suatu peristiwa.

Skematik menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Arti penting dari skematik adalah sebagai strategi untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan bagian mana yang didahulukan, dan bagian mana yang kemudian disembunyikan.⁶⁷

Sedangkan semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu

⁶⁷ Eriyanto, *op.cit.*, hal. 229-234. *commit to user*

bangunan teks. Dengan kata lain, semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu peristiwa. Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat.



BAB II

DESKRIPSI HARIAN KOMPAS

A. Sejarah Singkat

Harian Kompas terbit resmi pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965 dengan oplah sebanyak 4.828 eksemplar. Berbagai gagasan untuk menerbitkan surat kabar ini sebenarnya sudah bermunculan sejak 1964. Partai Katolik ingin menerbitkan surat kabar dengan nama Gagasan Baru oleh karena merasa berbagai pemberitaan Surat Kabar Harian Rakyat milik Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin mendominasi wacana perpolitikan negeri dan mempengaruhi langkah politik Presiden Soekarno. Namun, perizinan penerbitan surat tidak diberikan oleh Kodam Jaya.

Gagalnya mewujudkan gagasan tidak pudar di kemudian hari. Awal tahun 1965, Menteri/ Panglima TNI AD, Letjen Ahmad Yani, dengan motif yang relatif sama, berupaya menghadang dominasi pemberitaan pers komunis, juga melemparkan gagasan penerbitan surat kabar kepada Drs Frans Seda, Menteri Perkebunan saat itu. Gayung bersambut, Frans Seda bersama Ignatius Josef Kasimo, pimpinan Partai Katolik, Drs Jakob Oetama dan Mr Auwjong Peng Koen—dua tokoh yang memiliki pengalaman menerbitkan media cetak—mengkaji berbagai hal yang menyangkut kelayakan mewujudkan gagasan tersebut.

Gagasan mulai berujud sejalan dengan dibentuknya Yayasan Bentara Rakyat. Yayasan yang berfungsi sebagai payung organisasi penerbitan surat kabar

ini dibentuk pada 16 Januari 1965 dan disahkan di kantor Notaris FJ Mawati, Jakarta, dengan modal dasar Rp 100,000. Susunan Pengurus yayasan yakni II Kasimo (ketua), Drs Frans Seda (wakil ketua), FC Palaunsuka (penulis I), Drs Jakob Oetama (penulis II), dan Mr Auwjong Peng Koen (bendahara).

Berdirinya yayasan, ternyata belum cukup menjamin terbitnya surat kabar yang diharapkan. Persyaratan kepemilikan bukti kesediaan minimal 3.000 anggota masyarakat untuk berlangganan surat kabar ini pun dikenakan Kodam Jaya, yang dinilai sebagai upaya penghambatan. Pernyataan kesediaan berlangganan sebagian masyarakat Flores, baik anggota Partai Katolik, guru, anggota koperasi, melalui Frans Seda membantu pemenuhan persyaratan penerbitan surat kabar. Perizinan pun tidak mungkin lagi untuk tidak dikeluarkan.

Ketika akan menjelang terbit pertama kalinya Frans Seda yang pada waktu itu menjabat menteri perkebunan melaporkan pada presiden Soekarno tentang kesiapan terbitan perdana harian Bentara Rakyat. Dari Presiden Soekarno inilah lahir usulan nama “Kompas” yang berarti adalah penunjuk arah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, usulan dari Presiden Soekarno untuk mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas diterima. Setelah segala sesuatu dirasakan sesuai, tanggal 24 Juni 1965, Kompas mulai dicetak edisi percobaan selama tiga hari berturut-turut. Pencetakan dilakukan di Percetakan Negara Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Kemudian tepat hari Senin, 28 Juni 1965, bayi Kompas lahir, dengan motto, “Amanat Hati Nurani Rakyat.” Berita utama di halaman satu berjudul “KAA II Ditunda Empat Bulan.” Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, “Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil.” Halaman 2, muncul Tadjuk dengan tulisan Lahirnya Kompas. Di samping itu terdapat pula lima berita luar negeri dan dua berita dalam negeri, serta tambahan tiga artikel, Halaman 3, diisi dengan tiga artikel serta ulasan penyakit oleh Dr Kompas. Sedangkan di halaman 4, terdapat tiga artikel berita dalam dan luar negeri serta dua berita olahraga.

Pada tanggal 5 Agustus 1965 Kolom “Tadjuk” Kompas berganti menjadi “Tadjuk Rencana”. Pada kolom perdana ini Kompas menampilkan opini yang berjudul Konsekwensi Menjembah Tuhan, berisi perjuangan mengamalkan nilai-nilai berketuhanan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, sebagaimana yang sudah dijadikan pijakan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam kolom ini ditegaskan pula pengamalan nilai-nilai berketuhanan ini tidak boleh berhenti dalam kata-kata namun juga dengan perbuatan.

Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pekerja media, terutama Koran. Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit untuk semua surat kabar yang beredar, termasuk Kompas, pada 2 Oktober 1965. Alasan pelarangan terbit bukan karena pemberitaan surat kabar tersebut di masa sebelumnya, namun oleh karena tindakan untuk menjaga agar pemberitaan tidak justru menambah rasa bingung

masyarakat terhadap peristiwa Gerakan 30 September yang tengah berkecamuk di Ibu Kota. Penutupan ini tidak bersifat menetap. Tanggal 6 Oktober 1965 Kompas terbit kembali berdasarkan keputusan Penguasa Perang Daerah nomor Kep. 04/P/X/1965.

Menginjak tahun 70-an, dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas cetak di Percetakan Kinta maka Kompas juga dicetak di percetakan lain seperti percetakan Surya Praba dan Jakarta Press. Ketergantungan terhadap percetakan milik pihak lain melahirkan keinginan membangun percetakan sendiri. Dengan bantuan kredit dari bank BNI 46 senilai Rp 236 juta, dari total biaya Rp 300 juta, percetakan berdiri. Sejak bulan Juni 1972 percetakan yang menggunakan mesin cetak web offset merek Pacer buatan Inggris ini sudah beroperasi dengan kapasitas cetak 20.000 eksemplar per jam. Saat digunakan, oplah Kompas sekitar 96.000 eksemplar dengan tebal tiap edisi 12 halaman.

Ternyata pelarangan terbit yang terjadi pada tahun 1965 bukanlah yang terakhir. Pada 21 Januari 1978 untuk kedua kalinya Kompas dilarang terbit oleh penguasa negeri. Kali ini bersama Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, *The Indonesia Times*, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Pelarangan diberitahukan melalui telepon pukul 20.25 oleh Kepala Penerangan Laksusda Jaya. Persoalan bermula dari kian memanasnya aksi-aksi mahasiswa menentang kepemimpinan Presiden Soeharto menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1978. Pelarangan bersifat sementara, setelah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kopkamtib yang diterima Kompas pada 4 Februari 1978. Sehari kemudian Kompas terbit kembali. Pencabutan larangan terbit setelah ketujuh surat kabar yang dibreidel

mengirimkan surat introspeksi dan koreksi diri kepada Presiden Soeharto, Menteri Penerangan serta Panglima Kopkamtib.

Kemudian seiring bergulirnya waktu Kompas terus berkembang dan oplahnya pun semakin meningkat. Jumlah halaman juga semakin bertambah. Dan demi mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta dalam upaya memperluas pembaca ke berbagai wilayah dalam dan luar negeri yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan distribusi surat kabar secara konvensional, Kompas versi internet diperkenalkan pertama kalinya dengan nama Kompas Online. Tanggal 22 Oktober 1995, Kompas Online resmi diluncurkan dalam pengelolaan Desk Online Kompas. Dalam perkembangannya, terbentuk Kompas Cyber Media (KCM) sejak 6 Agustus 1998. Selain menampilkan berita-berita yang termuat pada harian Kompas, *Kompas Cyber Media* juga memiliki versi bahasa Inggris yang diterjemahkan dari berita-berita pada harian Kompas.¹

B. Visi dan Misi

Visi surat kabar merupakan pedoman, dasar, dan ukuran penentuan kebijakan editorial dalam menentukan kejadian/ peristiwa yang dianggap penting oleh surat kabar untuk dipilih menjadi sebuah berita atau hanya sebagai bahan komentar. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional juga menjadi visi serta nilai dasar yang dihayati bersama oleh para wartawan yang bekerja pada suatu surat kabar.

Visi Kompas adalah “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan.” Dalam kiprahnya dalam industri pers, “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip “humanisme transedental” (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih spesifik, bisa diuraikan sebagai berikut² :

1. *Kompas* adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka.
2. *Kompas* tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan ekonomi.
3. *Kompas* secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok.
4. *Kompas* adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa.
5. *Kompas* bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintah yang menjadi lingkungan.

Sementara itu, Misi Kompas adalah sebagai berikut: “Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya.”

Misi yang diemban Harian Kompas tersebut bisa dikatakan adalah mengasah nurani dan membuat cerdas. Artinya pemberitaan Kompas selalu

² Haris Firdaus, Skripsi, *KONSTRUKSI KOMPAS DALAM DUA BLOG (Analisis Wacana Kritis tentang Konstruksi Harian Umum Kompas dalam Blog Kompas Inside dan Inside Kompas)*, Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2009.

mementingkan dimensi kemanusiaan, hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, anti diskriminasi dan perlawanan terhadap penindasan. Sesuai misi Kompas akan membuat pembacanya tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi lebih dari itu, setelah mencapai tahap pengetahuan yang cukup pembaca Kompas diharap dapat memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.

C. Nilai-nilai Dasar

Kompas dalam penyajian berita dan tulisan-tulisannya selalu diwarnai sikap tenggang rasa dan penuh pengertian. Manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, di tengah keagungan dan kekerdilannya merupakan sosok yang tidak pernah sempurna. Dengan demikian ketika Kompas menyampaikan cita-cita ideal yang makro, pada saat yang sama menyuarakan realitas kemiskinan dan keterpinggiran. Keluhuran manusia dan hak asasi setiap manusia diberi tempat dan dihargai. Kompas berusaha menjauhi cara-cara kritik dengan menyakiti hati orang, sebaliknya membiarkan orang memperbaiki sendiri. Dalam mengkritik dan menggugat, Kompas berpedoman “teguh dalam persoalan, lentur dalam cara”.³

Sejak hari pertama, di bawah logo Kompas tertera motto Amanat Hati Nurani Rakyat. Jakob menguraikan, “Hati nurani yang menghasratkan kesejahteraan, sesuai dengan martabat pribadi dan sosialnya, sesuai dengan kesatuan badani dan rohaninya. Kesejahteraan demikian itulah panggilan yang diamanatkan Tuhan. Tapi realisasinya harus disertai dengan perjuangan, oleh karena manusia juga dikaruniai kemauan bebas. Ada syarat-syarat obyektif yang

commit to user

³ Sularto, *op.cit*, hal 55.

dibutuhkan untuk mewujudkan tuntutan hati nurani; yakni kebebasan, keadilan, dan rahmat Tuhan. Oleh karena setiap bentuk penindasan dan penghisapan memungkinkan syarat-syarat obyektif. Maka hati nurani akan menentang segala bentuk penindasan.⁴

Kemudian Jakob Oetama juga selalu menyebutkan, “Pandangan, sikap hidup dan orientasi nilai Kompas adalah paham kemanusiaan yang beriman, yang percaya kepada nilai abadi dan nilai kemanusiaan. Bukan saja pendidikan yang diperlukan anak manusia, tetapi juga pencerahan, pendidikan akal budi. Ilmu, kepandaian, kecerdasan menjadi bagiannya. Tetapi juga watak atau karakter, kepribadian, rasa tanggungjawab, kejujuran dan ketulusan.”⁵

Kompas pun merumuskannya menjadi nilai-nilai dasar yang diwujudkan dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya
2. Mengutamakan watak baik
3. Profesionalisme
4. Semangat kerja tim
5. Berorientasi pada kepuasan (pembaca, pengiklan, mitra kerja penerima proses selanjutnya)
6. Tanggungjawab sosial

⁴ *Ibid*, hal 122.

⁵ Sularto, *op.cit* hal 132.

D. Kebijakan Redaksional

Kebijakan redaksional yang dianut oleh suatu surat kabar adalah hasil penjabaran visi atau pandangan dari surat kabar yang bersangkutan. Kebijakan redaksional menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih surat kabar untuk menjadi bahan berita utama maupun berita komentar.

Untuk lebih jelasnya, kebijakan redaksional Kompas tertuang dalam beberapa pernyataan berikut :

- a. Tidak berpihak pada satu golongan, partai, maupun agama dalam pemberitaannya.
- b. Tidak membenarkan mengkritik seseorang mengenai hal-hal yang pribadi
- c. Mengutamakan *check* dan *recheck* dalam proses pemberitaannya.
- d. Menghargai hal-hal *off the record*.
- e. Menghargai hak jawab balik dalam bentuk berita maupun surat pembaca.
- f. Tidak membenarkan wartawan-wartawannya mencari keuntungan pribadi.
- g. Tidak membuat berita-berita yang mengandung unsur SARA
- h. Tidak ada kebijaksanaan prosentase volume atau isi yang akan dimuat baik politik, ekonomi dan berita lainnya. Dengan kata lain, mana berita yang aktual dan bermanfaat bagi pembaca, maka itulah yang akan dimuat.

commit to user

E. Rubrikasi

1. Kompas Nasional

Kompas terbit sebanyak 32 halaman setiap harinya, di samping terdapat halaman-halaman tambahan, di antaranya halaman Fokus, Kompas Muda, Kompas Kampus, Teropong, Karier, Inspiratorial, dan sebagainya. Untuk halaman utama, pada hari biasa rubrik-rubrik yang ada di dalamnya yaitu :

- a) Berita Utama. Yakni pada halaman 1, yang berisi berita headline peristiwa nasional, terdiri dari *hard news* dan *feature* serta dilengkapi pula dengan foto.
- b) Politik & Hukum. Berisi seputar berita-berita politik dan hukum yang terjadi di dalam negeri. Terdapat pula kolom bernama Kilas Politik & Hukum yang berisi berita-berita yang ringan dan singkat. Rubrik ini terdapat pada halaman 2, 3, 4, dan 5. Namun halaman ini pun bisa berubah dan berpindah tempat, dikarenakan ada halaman tambahan.
- c) Opini. Halaman opini khusus ditempatkan pada halaman 6 dan 7. Halaman 6 berisi dua buah tajuk rencana, yang menyoroti isu nasional dan internasional pada sisi kiri halaman, karikatur, kolom opini dan pojok yang diberi tajuk mang usil. Pada halaman 7 terdapat artikel opini dan surat pembaca yang diberi judul Redaksi Yth.
- d) Internasional. Halaman internasional berisi berita-berita yang terjadi di luar negeri, baik masalah politik, hukum, keamanan dan sebagainya dengan disertai foto-foto pilihan. Terdapat pula kolom Kilas Luar

Negeri dan Kilasan Kawat Dunia yang berisi informasi kejadian-kejadian ringan yang terjadi di berbagai negara.

- e) Pendidikan & Kebudayaan. Rubrik ini terdapat pada halaman 12, berisi berita *hard news* maupun *features* seputar masalah pendidikan dan yang berkaitan dengan kebudayaan di Indonesia.
- f) Lingkungan & Kesehatan. Rubrik pada halaman 13 ini menyoroti permasalahan kesehatan dan lingkungan yang terjadi, memuat berita dan informasi, dilengkapi pula dengan dokumentasi foto.
- g) Ilmu Pengetahuan & Teknologi. Seperti namanya, rubrik yang hanya satu halaman dan terletak pada halaman 14 ini mengulas seputar ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h) Umum. Rubrik ini berisi sebuah kolom opini dari pembaca, sambungan dari berita di halaman awal, serta cerita bersambung yang biasanya diambil dari sebuah novel. Rubrik Umum terdapat pada halaman 15.
- i) Sosok. Rubrik pada halaman terakhir lembar utama ini berisi tentang ulasan dan biografi seseorang yang berprestasi, terkenal, telah membuat karya, maupun seseorang yang biasa namun telah melakukan hal-hal yang luar biasa dan bermanfaat bagi banyak orang. Biasanya tulisan hanya setengah halaman dan selebihnya diisi dengan iklan.
- j) Bisnis & Keuangan. Rubrik ini berada di lembar yang lain di samping lembar utama yang ada. Terdapat di halaman 17 sampai halaman 21, membahas segala hal mengenai perekonomian, bisnis dan keuangan.

Berisi ulasan mengenai kondisi ekonomi baik di negara kita maupun perekonomian global, berita-berita seputar perekonomian, informasi indeks harga saham Bursa Efek Indonesia, informasi kurs mata uang asing dan sebagainya.

- k) Nusantara. Berisi berita berat maupun ringan seputar permasalahan di dalam negeri, baik itu bencana, kasus kriminalitas maupun konflik. Pada halaman 22 juga kolom Kilas Daerah. Terkadang satu halaman penuh ditampilkan foto-foto dokumentasi dari peristiwa yang dianggap penting dan fenomenal yang saat itu sedang terjadi.
- l) Metropolitan. Terdapat pada halaman 25 hingga halaman 27. Memuat tentang berita-berita peristiwa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Ditampilkan pula sebuah gambar karikatur berjudul Jakartaria.
- m) Olahraga. Rubrik yang ada di halaman 28 hingga halaman 31 ini berisi informasi dan berita dari berbagai cabang olahraga. Terdapat pula sub rubrik Data dan Agenda yang berisi informasi hasil pertandingan baik itu dari sepakbola, basket, tenis dan sebagainya.
- n) Nama dan Peristiwa. Terdapat pada halaman paling belakang pada lembar Bisnis & Keuangan dan memuat berita dan informasi ringan seputar artis, musisi maupun tokoh masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri.

Khusus untuk Kompas Minggu, substansi di dalamnya berbeda dengan hari biasa. Rubrik-rubrik yang ada di dalamnya antara lain: Halaman Utama/ Headline pada halaman 1, Rubrik Umum pada halaman

2. Nusantara pada halaman 3, Metropolitan pada halaman 4, rubrik Olahraga pada halaman 5 hingga halaman 8, rubrik Internasional pada halaman 10, rubrik Umum pada halaman 11, rubrik Foto Pekan Ini pada halaman 12, rubrik Tren pada halaman 13 hingga halaman 19, rubrik Seni pada halaman 20 sampai halaman 22, Surat Pembaca pada halaman 23, Nama & Peristiwa pada halaman 24, rubrik Urban pada halaman 25 sampai halaman 27, rubrik Anak pada halaman 28 dan 29, Kartun dan TTS pada halaman 30, rubrik Kehidupan pada halaman 31 dan 32, dan yang terakhir Klasika yang berisi iklan, maupun tips ringan dan resep masakan pada halaman 33 hingga halaman 36.

2. Kompas Lokal

Untuk lebih mendekatkan diri dengan khalayaknya di daerah, Harian Kompas juga menerbitkan Kompas lembar daerah di beberapa propinsi di Indonesia. Lembar daerah ini berisi tentang berita yang terjadi secara lebih spesifik mencakup daerah propinsi tersebut. Beberapa propinsi ini seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Sumatera Bagian Barat, dan Sumatera Bagian Selatan.

Untuk Kompas lembar daerah Jawa Tengah biasanya diterbitkan dengan jumlah halaman antara 12 hingga 16 halaman. Halaman tersebut terbagi sebagai berikut :

- a) Halaman A, adalah halaman yang menyajikan berita head line yang terjadi di Jawa Tengah biasanya berbentuk beberapa *hard news* dan *commit to user*

satu *feature* tidak lupa disertai foto utama. Tambahan informasi juga disajikan dalam bentuk data-data dari bagian litbang yang bernama rubrik Indikator dan prakiraan cuaca untuk daerah Jateng.

- b) Halaman B, adalah halaman yang menyajikan berita tentang ekonomi di Jawa Tengah biasanya juga disisipi *feature* profil tentang pengusaha atau industri yang bernama rubrik “Wajah”.
- c) Halaman C, adalah halaman yang menyajikan berita seputar Kota Semarang.
- d) Halaman D, adalah halaman yang menyajikan forum pembaca yang terdiri dari artikel kiriman pembaca, surat pembaca, dan pada hari Jumat terdapat kolom artikel bagi mahasiswa yang bernama “Akademia”.
- e) Halaman E, F, G, H, atau bisa lebih dari halaman itu adalah lembar khusus untuk iklan.
- f) Halaman I, adalah halaman yang menyajikan berita seputar daerah-daerah di Jawa Tengah.
- g) Halaman J, adalah halaman yang menyajikan berita dari daerah Yogyakarta.
- h) Halaman K, adalah halaman yang menyajikan berita dari daerah Surakarta dan sekitarnya. Menurut Kepala Biro Kompas Jateng, Subur Tjahjono, Surakarta sebagai salah satu daerah di Jateng diberikan halaman khusus pada lembar Kompas Jateng ini, karena dinilai

Surakarta salah satu daerah dengan perkembangan serta pertumbuhan pembangunan yang pesat di Provinsi Jawa Tengah.

- i) Halaman L, adalah halaman yang diberi nama “Gelanggang“. Menurut Subur Tjahjono awalnya lembar ini khusus ditujukan untuk memberitakan olahraga di seputar Jawa Tengah. Namun seiring perkembangan waktu akhirnya lembar ini juga digunakan untuk memuat berita ringan dari bidang kesenian, budaya, dan pendidikan. Seseekali pada hari-hari tertentu seperti hari Selasa, Jumat, Sabtu terdapat tambahan rubrik khusus. Pada hari Selasa terdapat kolom artikel pembaca yang membahas tentang kota yang diberi nama “Kota Kita“. Hari Jumat ada kolom khusus yang menginformasikan tentang tempat makan enak di berbagai daerah Jawa Tengah yang diberi nama kolom “Andrawina“. Pada hari Sabtu juga terdapat kolom tentang wisata yang bernama kolom “Jalan-Jalan“.

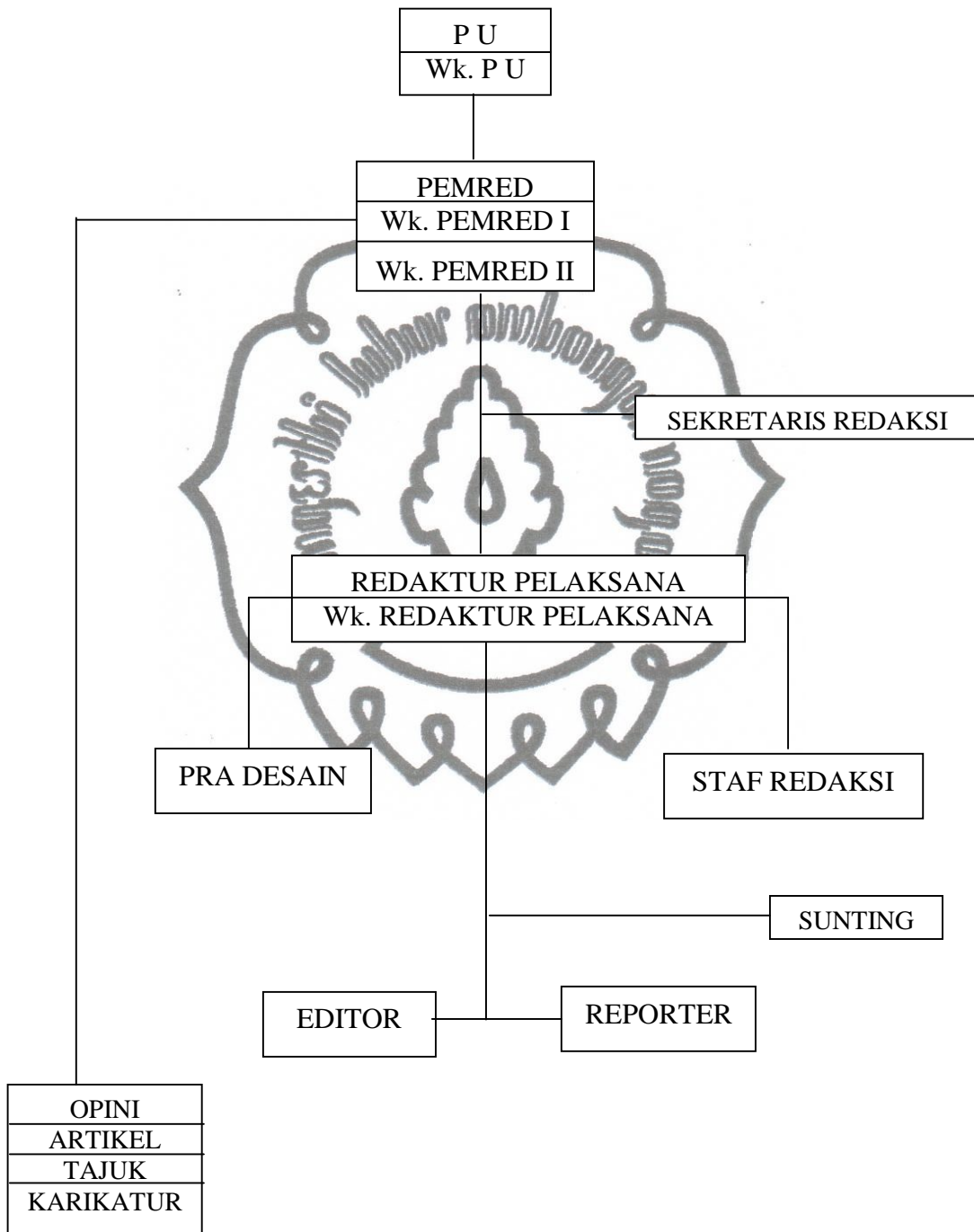
Kolom-kolom berita di lembar Jawa Tengah terkadang bisa berubah susunan letaknya. Hal ini bisa disebabkan kebutuhan ruang iklan dan lain hal. Hanya halaman *headline* (A) dan ”Gelanggang” yang tidak pernah berubah.

F. Struktur Organisasi

PT KOMPAS Media Nusantara adalah lembaga media massa, pemimpin tertinggi adalah pemimpin umum. Pemimpin umum dibantu oleh wakil pemimpin umum bidang non bisnis dan wakil pemimpin umum bidang bisnis. Kemudian ada pemimpin redaksi yang bertanggung jawab bidang redaksi dan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab bidang bisnis.



Gambar II⁶
Struktur Organisasi Harian Umum Kompas



⁶ Prithaningtyas, Skripsi, *HUMANISME DALAM PEMBERITAAN PERS (Analisis Wacana Berita Semburan Lumpur Panas Lapindo di Harian Kompas dan Jawa Pos Periode 1 Nopember – 30 Nopember 2006)*, Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2008.

G. Susunan Redaksi

Saat ini susunan redaksi harian Kompas adalah sebagai berikut :

Pemimpin Umum	: Jakoeb Oetama
Wakil Pemimpin Umum	: Agung Adiprasetyo, St. Sularto
Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab	: Rikard Bagun
Wakil Pemimpin Redaksi	: Trias Kuncahyono, Taufik H. Mihardja
Redaktur Senior	: Ninok Leksono
Redaktur Pelaksana	: Budiman Tanuredjo
Wakil Redaktur Pelaksana	: Andi Suruji, James Luhulima
Sekretaris Redaksi	: Retno Bintarti, M. Nasir

BAB III

ANALISA TAJUK RENCANA HARIAN KOMPAS

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual, opini redaksi tentang masalah tersebut, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Informasi yang aktual adalah mutlak karena perkembangan informasi dan masalah selalu terjadi setiap waktu. Pendapat redaksi yang diungkapkan mewakili pikiran dari media tersebut. Dalam tajuk rencana biasanya dilengkapi pula dengan fakta-fakta dan data pendukung untuk memperkuat pendapat dari redaksi. Dan sebagai pandangan dan opini dari suatu media, tajuk rencana juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pendapat publik dengan ulasan-ulasannya. Karena melalui media massa pulalah seringkali persepsi, pandangan dan sikap masyarakat terhadap suatu permasalahan dibentuk.

Salah satu permasalahan yang menarik untuk diperhatikan pada periode tahun yang lalu yakni tentang kasus penahanan dua pimpinan non aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Publik bereaksi keras karena menilai apa yang terjadi adalah suatu apa yang disebut dengan kriminalisasi KPK. Tidak saja masyarakat yang resah, namun juga pemerintah yang akhirnya terpaksa turun tangan menangani masalah tersebut. Media pun seakan tak pernah berhenti menyoroti kasus ini, baik media cetak maupun elektronik. Tidak terkecuali Kompas yang selalu memberitakan perkembangan terbaru masalah berat yang menimpa KPK itu. Dalam terbitannya Kompas tidak sedikit memuat tajuk

rencana menanggapi hal tersebut. Untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan Kompas terhadap kasus penahanan Bibit – Chandra dapat terlihat dari hasil penelitian berikut ini.

A. Tematik Tajuk Rencana Kompas

Seperti telah diketahui, Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa tingkatan/ struktur yang masing-masing bagian saling mendukung. Tingkatan yang pertama adalah struktur makro. Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Memang, Van Dijk lebih menekankan penggunaan metodenya untuk menganalisis tulisan dalam bentuk berita. Namun Guy Cook dalam Eriyanto mengungkapkan teks adalah semua bentuk bahasa, termasuk semua kata-kata yang tercetak di lembar kertas. Maka dalam hal ini opini media yang termuat dalam tajuk rencana/ editorial dapat dianalisis dengan menggunakan model Van Dijk ini.

Elemen tematik merupakan makna global dari suatu teks yang berupa gambaran umum mengenai pendapat atau gagasan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Dapat juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Dengan kata lain elemen tematik yaitu ‘apa yang ingin dikatakan’ dalam sebuah teks. Topik menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan atau gagasan inti dari wartawan (dalam hal ini pimpinan redaksi, sebagai penanggung jawab tajuk rencana - pen) ketika

melihat atau memandang suatu peristiwa. Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu teks.¹

Dalam tajuk rencana Kompas yang berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra setidaknya ada tiga tema pokok dari 8 tajuk rencana yang diteliti dengan mengambil periode bulan Oktober – Desember 2009. Tema pokok yang dimaksud merupakan sudut pandang yang diambil pemimpin redaksi Kompas dalam menuliskan tajuk rencananya.

1. Kasus Bibit-Chandra sebagai Kasus Hukum

Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa-peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan; vonis.²

Achmad Ali kemudian menjelaskan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Perspektif hukum ini sangat umum digunakan baik dalam pemberitaan maupun penulisan artikel opini terkait kasus Bibit dan Chandra. Hal ini disebabkan karena memang kasus yang

¹ Eriyanto, *op.cit*, hal. 229.

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hal. 410.

dibahas merupakan kasus hukum. Kompas pun demikian, karena rata-rata tajuk rencana yang dibuat berdasarkan kasus Bibit-Chandra ini, yakni dari perspektif hukum. Seperti diungkapkan dalam salah satu tajuk rencana yang berjudul *Penahanan yang Kontroversial* :

Polri mempunyai kewenangan menahan, tetapi publik menyayangkan langkah Polri menahan Bibit dan Chandra. Sebagaimana dijelaskan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana, "Mulai hari ini kami menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan. Persoalan obyektif dan subyektif telah terpenuhi." Dalam keterangannya, Polri juga menyinggung soal kerapnya kedua tersangka menggelar jumpa pers. (Kompas, 30 Oktober 2009)

Di sini Polri sebagai salah satu penegak hukum yang memang memiliki hak dan kewenangan untuk menahan³ sudah mendapat pertentangan dari publik yang kecewa atas penahanan Bibit dan Chandra. Mereka berdua ditahan sejak Kamis (29/ 10) dengan dakwaan telah menyalahgunakan kewenangan karena mereka mencekal Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Anggoro dan Djoko adalah buronan kasus korupsi yang tinggal di luar negeri.

Kritik publik muncul karena tuduhan Polri terhadap keduanya terus berubah-ubah dari penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, hingga pemerasan. Keraguan publik pun semakin nyata setelah terungkapnya rekaman percakapan yang diduga melibatkan Anggodo dengan sejumlah petinggi hukum negeri ini.

Menurut Kompas, publik mulai 'bersuara keras' karena menganggap tuduhan terhadap Bibit dan Chandra selalu berubah-ubah

³ Terdapat pada Bab III Tentang Wewenang dan Kewajiban pasal 13 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang berbunyi 'Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang: menerima pengaduan; memeriksa tanda pengenalan; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; menangkap orang; menggeledah badan; **menahan orang sementara**; dst'. Dapat dilihat di <http://www.legalitas.org>

sehingga menimbulkan keraguan. Aparat hukum memang memiliki kewenangan merampas kemerdekaan seseorang. Namun keputusan menjebloskan tersangka ke dalam penjara bukan atas putusan pengadilan mestinya tidak dilakukan semena-mena, harus atas dasar yang terukur. Kebebasan adalah hak asasi yang mestinya dilindungi oleh Negara. Bahkan salah satu alasan penahanan yang dilakukan terhadap mereka dinilai oleh Kompas termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini, hak menyampaikan pendapat.

Hakim MK juga menyayangkan penahanan yang dilakukan terburu-buru. Alasan penahanan yang salah satunya adalah kerapnya tersangka berbicara kepada pers juga dipertanyakan. Berbicara kepada publik adalah hak asasi manusia dan setiap tersangka tentunya mempunyai hak membela diri!

Kompas menilai bahwa salah satu alasan penahanan tersangka Bibit-Chandra yakni seringnya mereka berbicara kepada publik, patut dipertanyakan. Karena berbicara di depan publik adalah hak asasi manusia⁴. Selain itu Bibit-Chandra berbicara di hadapan masyarakat melalui media massa adalah untuk membela diri atas tuduhan yang didakwakan kepada mereka. Dan apabila kemudian muncul opini publik, mereka juga tidak bisa dipersalahkan, karena media lah yang mempengaruhi publik, bukan mereka. Karena seperti telah diketahui, kasus yang menguras pikiran para penegak hukum ini tidak henti-hentinya

⁴ Seperti yang telah diketahui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

disoroti oleh media, sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian muncul berbagai opini publik, baik yang pro maupun yang kontra.

Dalam tajuk rencana yang lain berjudul *Menindak Mafia Peradilan*, Kompas menyoroti upaya pemerintah untuk memberantas apa yang dinamakan mafia peradilan. Topik mafia peradilan muncul seiring dengan kehebohan kasus penahanan Bibit dan Chandra. Dalam keterlibatan kasus hukum, peradilan bisa dijualbelikan. Inilah yang amat memprihatinkan bagi penegakan hukum di negeri kita.

Apa yang disiarkan Mahkamah Konstitusi mempertontonkan kepada kita sebuah potret nyata bagaimana perkara bisa diatur. Keadilan bisa diperjualbelikan. Mafia peradilan melibatkan polisi, jaksa, advokat, dan dalam beberapa kasus hakim. Sebelum terungkapnya Anggodo, kita pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani. Pejabat kejaksaan ikut terkena dampaknya.
(Kompas, 6 November 2009)

Dalam petikan tajuk tersebut, Kompas memberikan satu contoh dimana pernah terjadi suap-menyuap dalam perkara hukum. Tindakan-tindakan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum dan masuk ke dalam kasus korupsi sehingga menjadi wewenang KPK untuk mengusut tuntas dan menangkap para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu dalam tajuk rencana berjudul *Pelajaran Bibit - Chandra*, Kompas mengungkapkan bahwa sebagai kasus hukum, masalah tersebut memiliki kompleksitas tersendiri. Kemungkinan atas dasar itulah maka kasus ini berbelit-belit penyelesaiannya dan seakan bertambah kompleks. Kompas pun mengungkapkan keprihatinannya akan akibat kasus yang ternyata mampu memecah belah masyarakat serta

menimbulkan keraguan akan kesatuan komitmen KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai masalah hukum, kasus Bibit-Chandra memiliki kompleksitas tersendiri. Lebih rumit lagi karena persoalan hukum selalu berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat.....

Lebih memprihatinkan lagi, kasus Bibit-Chandra tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mempertontonkan polarisasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Polarisasi itu menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang kesamaan dan kesatuan komitmen ketiga lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. (Kompas, 2 Desember 2009)

Dalam tajuk rencana lainnya yang menyoroti masalah hukum kasus Bibit Chandra, yang berjudul *Berharap Ada Solusi Akhir*, Kompas berpendapat bahwa yang terjadi sekarang ini, yakni semakin rumitnya kasus dan hiruk pikuk pro kontra terhadap KPK dan Polri mengindikasikan adanya sebuah krisis kepercayaan pada lembaga penegak hukum.

Apa yang terjadi sekarang ini adalah krisis kepercayaan pada lembaga penegak hukum. Sepak terjang Anggodo Widjojo telah menampar muka kita dan kita tak berdaya menghadapinya. Kita berharap Presiden bisa mengambil solusi mengakhiri kasus yang memiliki sensitivitas politik tinggi. (Kompas, 17 November 2009)

Selanjutnya Kompas mengungkapkan beberapa alternatif pemecahan kasus.

Kelompok masyarakat sipil mengusulkan penghentian penyidikan karena sesuai dengan temuan Tim Delapan bukti tidak mencukupi.....

Kejaksaan bisa mengambil peranan dengan menghentikan penuntutan.....

Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden pun bisa mengambil langkah dengan memberikan abolisi.

Alternatif terakhir adalah membiarkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Selain akan memakan waktu lama, proses ini sekaligus juga akan

mendelegitimasi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuk Presiden sendiri.

2. Dampak Terhadap Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintahan diartikan proses, cara, perbuatan memerintah; segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.⁵

Dalam perspektif ini Kompas menyoroti tentang kaitan kasus korupsi yang sedang terjadi dengan pemerintahan kita saat ini. Dalam salah satu tajuk rencananya, Kompas memberikan pendapat mengenai kaitan antara kasus Bibit-Chandra yang sedang bergulir dengan pemerintahan presiden saat itu yang baru berjalan beberapa bulan. Seperti yang diungkapkan dalam tajuk rencana yang berjudul *Kenapa Jadi Begini*, dimana Kompas memaparkan bahwa baru saja dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, namun langsung dihantam dengan adanya kasus yang melibatkan banyak pihak itu.

Kita masuki periode pemerintahan Presiden SBY yang kedua dengan harapan besar, optimisme tinggi, dan kebersamaan yang menjanjikan. Semangat dan suasana optimis kita tangkap sebagai suasana yang kuat dan menjanjikan sebagai modal kerja bersama. Oposisi ada, bahkan dibiarkan ada, dalam parlemen maupun di luar parlemen serta diharapkan dan diupayakan agar kritis tetapi konstruktif. Pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Boediono berada dalam posisi dan suasana memulai bekerja secara produktif, kreatif, efektif, dan efisien. (Kompas, 2 November 2009)

commit to user

⁵ Tim Penyusun Kamus, *op.cit*, hal. 860.

Kompas memandang pemerintahan yang akan berjalan di bawah kepemimpinan Presiden SBY tersebut dengan optimis, namun kemudian khawatir apabila kasus korupsi yang sedang terjadi, dapat mempengaruhi pemerintahan yang baru. Karena seperti kita tahu, kasus penahanan Bibit – Chandra melibatkan banyak pihak dan mendapat perhatian besar pula dari masyarakat. Protes dari berbagai kalangan dan dengan berbagai macam cara muncul terutama setelah ditahannya Bibit dan Chandra.

Hal itu tidak kita kehendaki karena eskalasi yang demikian akan mencairkan konsentrasi kita bersama mendukung pemerintahan Presiden SBY. Kita khawatir kondisi dan suasana yang sejauh ini kondusif dan optimis ikut terganggu.

Di samping itu Kompas juga mengungkapkan kekhawatiran perihal kasus tersebut yang apabila tidak segera diselesaikan dan dibiarkan berlajut, persoalannya akan semakin rumit. Kemudian optimisme yang menyertai pemerintahan yang baru pun akan ikut terpengaruh secara negatif. Sementara itu hal ini merupakan ujian pula bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan tanggungjawab dan kepemimpinan mereka.

Jika dibiarkan berlarut, kerumitan persoalan bertambah. Demikian pula optimisme yang menyertai pemerintahan baru juga ikut terpengaruh secara negatif. Kepemimpinan dan tanggung jawab pihak yang terlibat diuji.

Keprihatinan terhadap kasus yang sedang bergulir akan dampaknya terhadap pemerintahan SBY kembali diungkapkan Kompas dalam tajuk yang berjudul *Sebuah Sumbatan Besar*. Menurut Kompas, konflik yang terjadi dan berlarut-larut membuat agenda nasional yang lain menjadi tersisihkan.

Kita tidak tahu kapan pentas di panggung ini berakhir. Pertanyaan itu pantas kita ajukan karena sudah hampir dua minggu (bahkan lebih) publik disuguhi konflik soal Bibit dan Chandra. Agenda Rembuk Nasional sebagai agenda pembangunan bangsa tenggelam dalam hiruk-pikuk kasus itu. (Kompas, 10 November 2009)

Lebih lanjut Kompas memandang kasus Bibit-Chandra sebagai sumbatan besar bagi pemerintah kita. Energi bangsa benar-benar terkuras untuk menyelesaikan permasalahan ini. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Hal ini merupakan kekhawatiran lainnya dimana saat semua perhatian terpusat pada kasus Bibit dan Chandra, memungkinkan problematika yang lain sedikit tergeserkan dan mendapat sedikit porsi perhatian.

Kasus Bibit dan Chandra telah menjadi sumbatan besar. Kita seakan tak bisa segera melangkah sebelum masalah ini terselesaikan. Energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan problem ini.

3. Dukungan dari Masyarakat

Kompas tak ketinggalan pula membahas masalah sosial dalam tajuk rencananya. Sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat; kemasyarakatan; suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma dan sebagainya.⁶ Dalam hal ini adalah saat masyarakat dari berbagai kalangan bersatu padu mendukung Bibit – Chandra terkait penahanan keduanya. Solidaritas masyarakat yang mendukung mereka patutlah diacungi jempol. Walaupun hanya beberapa, namun sangat kentara sekali, salah satunya yakni pada tajuk rencana yang berjudul *Dukungan dari Jagat Maya*.

Di sini Kompas mengungkapkan perihal dukungan dari warga yang terus saja meningkat seiring waktu. Selain mereka melakukan demonstrasi

commit to user

⁶ Muhammad Ali, *op.cit*, hal 412.

atau aksi-aksi di dunia riil, wujud dukungan mereka yakni melalui dunia maya, dan yang paling marak adalah melalui *facebook*.

Dukungan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, di dalam dan luar negeri. Selain mewujud di jagat riil seperti demo, dukungan juga mewujud di jagat maya (virtual). Senin (2/11), dukungan melalui situs jejaring sosial Facebook dilaporkan sudah mendekati 300.000. (Kompas, 3 November 2009)

Dukungan dari masyarakat yang terus mengalir dinilai oleh Kompas tidak hanya sebatas jumlah angka banyaknya orang yang pro terhadap apa yang mereka yakini benar, namun juga memberi kesan bahwa apa yang mereka sampaikan terutama melalui dunia maya adalah suara hati nurani mereka. Mereka secara blak-blakan berani menyampaikan pendapat mereka, yang mungkin jarang bisa dilakukan di dunia nyata.

Mereka yang menggalang dukungan melalui jejaring sosial online, selain mendapatkan pendukung, juga mendapatkan komentar yang blakblakan, memberi kesan bahwa yang disampaikan adalah suara hati nurani.

Kompas juga menyoroti tentang media massa, yang memberi kesan bahwa dahulu seringnya berorientasi pada politik atau mereka sebagai perusahaan bisnis, namun saat ini memiliki orientasi penuh pada hati nurani rakyat. Hal ini tampak pada tajuk rencana yang berjudul *Nurani Rakyat Via Media*. Media sekarang berani menyampaikan yang diyakini benar dan mengatakan yang salah adalah salah. Hal ini jelas terlihat pada kasus yang sedang terjadi, dimana masyarakat dari segala lapisan menyampaikan pendapat dan dukungan mereka melalui media, sedangkan media tersebut tidak pula secara sembunyi-sembunyi menyiarkannya.

commit to user

Kompas memandang ini sesuai dengan salah satu prinsip jurnalisme, yaitu kewajiban pertama pers adalah bagi kebenaran. Dukungan rakyat terhadap Bibit dan Chandra melalui bermacam media baik cetak maupun elektronik, membuktikan hal ini.

Tanpa bermaksud memuji keluarga sendiri, kita ingin menggarisbawahi sikap media Indonesia terhadap apa yang sering disebut sebagai kasus kriminalisasi KPK. Paling tidak, dari apa yang sejauh ini muncul dalam pemberitaan media di Indonesia, apakah itu cetak atau elektronik—mencakup TV, radio, dan online—ada kesan bahwa media yang sebelumnya mungkin dicitrakan menurut orientasi politik ataupun bisnisnya, kali ini sepenuhnya berorientasi pada hati nurani rakyat, secara nyaring, dan blak-blakan. (Kompas, 6 November 2009)

Tabel III
Tematik Tajuk Rencana Kompas

Tematik	Edisi	Judul Tajuk Rencana
Kasus Bibit-Chandra sebagai Kasus Hukum	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan yang Kontroversial
	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan
	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit – Chandra
	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir
Dampak Terhadap Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?
	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar
Dukungan dari Masyarakat	Kompas, 3 November 2009	Dukungan dari Jagat Maya
	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media

B. Skematik Tajuk Rencana Kompas

Teks atau wacana, umumnya memiliki skema atau alur tertentu yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti.⁷

Van Dijk mengungkapkan bahwa dalam berita umumnya secara hipotetik mempunyai dua kategori skema besar. Pertama, *summary* yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni judul dan *lead*. Judul dan *lead* umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Kedua, *story*, yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini secara hipotetik juga mempunyai dua subkategori. Yang pertama berupa situasi, yakni proses atau jalannya peristiwa, sedang yang kedua komentar yang ditampilkan dalam teks. Namun berita dengan opini tidaklah sama. Tajuk rencana yang merupakan opini dari redaksi suatu media biasanya memiliki struktur/ kerangka sebagai berikut :

1. Judul

Syarat judul tajuk rencana secara umum sama dengan judul artikel opini, yaitu harus provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, informal, representative, dan merujuk pada bahasa baku. Judul – judul tajuk rencana Kompas menurut penulis telah sesuai, singkat, padat, jelas dan tepat menggambarkan sekilas isi tulisan.

2. Pendahuluan

a. *Lead*

⁷ Eriyanto, *op.cit*, hal. 231-232.

Lead biasanya berfungsi untuk mempertegas judul sekaligus sebagai gambaran awal isi berita/ tajuk rencana. Dalam tajuk rencana Kompas, *lead* terdiri dari hanya satu atau dua kalimat pendek saja.

b. Fakta

Fakta yang diungkapkan dimaksudkan untuk mengawali pokok bahasan yang diulas dalam tajuk rencana itu. Dalam hal ini Kompas tercatat sering mengungkap fakta seputar kejadian/ peristiwa sebelum memberikan tanggapannya, hanya dalam satu paragraf. Fakta di awal tulisan juga berguna untuk mengingatkan kembali peristiwa yang tengah merebak untuk kemudian menjadi dasar atas pendapat yang diungkapkan.

3. Isi

a. Ide/ pandangan/ pendapat Kompas

Di sinilah letak inti dari tajuk rencana. Dimana Kompas mengeluarkan pendapatnya seputar topik yang dibahas, terkait dengan kasus Penahanan Bibit dan Chandra. Penulis menggarisbawahi beberapa point dari pendapat redaksi yang dimuat dalam tajuk-tajuk tersebut, yakni :

1) Akibat

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang ditimbulkan karena kasus yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan tersebut. Karena seperti telah diketahui, kasus tersebut terus bergulir, dan hingga kini belum selesai juga. Beberapa akibat yang disebabkan oleh kasus Bibit Chandra yang diungkapkan Kompas antara lain :

commit to user

- a) *Kasus Bibit dan Chandra telah menjadi sumbatan besar. Kita seakan tak bisa segera melangkah sebelum masalah ini terselesaikan. Energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan problem ini. Padahal, pekerjaan rumah bangsa masih banyak dan menuntut konsentrasi untuk menyelesaikannya. (Sebuah Sumbatan Besar)*
- b)
Hal itu tidak kita kehendaki karena eskalasi yang demikian akan mencairkan konsentrasi kita bersama mendukung pemerintahan Presiden SBY. Kita khawatir kondisi dan suasana yang sejauh ini kondusif dan optimis ikut terganggu. (Kenapa Jadi Begini?)
- c) *Situasi penuh ketidakpastian yang dibiarkan lebih dari tiga minggu ini jelas tidak menguntungkan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono! Keinginan pemerintah untuk segera bisa merealisasikan program 100 hari seakan tersandera dengan kasus ini. Sudah 29 hari waktu terbuang. (Berharap Ada Solusi Akhir)*
- d) *Suka atau tidak, silang pendapat mengenai kasus Bibit-Chandra telah membuat berbagai persoalan penting bangsa terdesak jauh ke belakang. Konsentrasi pemerintah dan masyarakat terpecah oleh tarikan kasus itu. (Pelajaran Kasus Bibit-Chandra)*
- e) *Lebih memprihatinkan lagi, kasus Bibit-Chandra tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mempertontonkan polarisasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Polarisasi itu menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang kesamaan dan kesatuan komitmen ketiga lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. (Pelajaran Kasus Bibit-Chandra)*

2) Langkah Penanganan Kasus

Yang dimaksud adalah langkah yang dilakukan para penegak hukum maupun pemerintah dalam rangka untuk menyelesaikan kasus yang sedang terjadi maupun kasus yang berhubungan dengan korupsi lainnya.

- a) *Putusan MK yang meminta KPK menyerahkan rekaman diharapkan bisa menjernihkan persoalan seputar dugaan rekayasa ditetapkannya Bibit dan Chandra sebagai tersangka sebagaimana disangkakan kuasa hukum Bibit dan Chandra. (Penahanan Yang Kontroversial)*
- b) *Dalam kondisi seperti itu, kita menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan pemberantasan mafia hukum dalam program 100 hari pemerintahannya. Presiden membuka PO Box 9949 untuk menerima laporan masyarakat yang menjadi korban mafia. "Saya persilakan laporkan melalui PO Box 9949 Jakarta 10000 dengan kode GM yang artinya ganyang mafia. (Menindak Mafia Peradilan)*
- c) *Bagaimanapun putusan Presiden, kejaksaan, dan kepolisian perlu diapresiasi karena telah menghentikan kehebohan atas kasus Bibit-Chandra yang telah menguras banyak pikiran dan tenaga. Tanpa bermaksud mengabaikan hukum, penyelesaian di luar pengadilan dapat dianggap terobosan, khususnya dalam situasi genting. (Pelajaran Kasus Bibit-Chandra)*

b. Data dan fakta pendukung

Seperti namanya, data atau fakta yang diberikan berguna untuk mendukung isi tulisan tajuk rencana.

4. Penutup (Kesimpulan)

a. Harapan

- 1) *Kita berharap semua pihak berkepal dingin dan tidak sekadar unjuk kekuasaan dalam menangani masalah yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Kita tak ingin koruptor melakukan serangan balik dengan memecah belah institusi negara demi untuk melanggengkan korupsi di negeri ini. (Penahanan Yang Kontroversial)*
- 2) *Diharapkan untuk isu-isu strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak, pers Indonesia juga dapat menggalang kebersamaan. Mungkin saja dalam menjalankan fungsi pilar keempat demokrasi, pers punya strategi berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun, satu hal yang*
commit to user

sama bagi pers adalah fungsi mengawal proses demokratisasi, yang ditandai oleh aktivitas check and balances. (Nurani Rakyat Via Media)

- 3) *Kita tetap meyakini Presiden Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan akan mampu mengurai benang kusut kasus Bibit dan Chandra serta mencarikan jalan keluarnya. (Sebuah Sumbatan Besar)*
- 4) *Kita berharap Presiden bisa mengambil solusi mengakhiri kasus yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Solusi yang mampu mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan keadilan memberikan energi baru untuk memerangi korupsi, melakukan konsolidasi institusi, dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi. Mendengar Tim Delapan adalah pilihan rasional. (Berharap Ada Solusi Akhir)*

b. *Saran dan jalan keluar (gagasan langkah penyelesaian kasus)*

- 1) *Presiden pun pernah memerintahkan agar pencatutan namanya dalam rekaman diusut tuntas. Karena itu, kita berharap Presiden bisa memerintahkan agar skandal penegakan hukum yang melibatkan Anggodo ditindak secara tegas..... (Menindak Mafia Peradilan)*

- 2) *Dalam konteks itu, penyelesaian segera kasus Bibit dan Chandra harus diutamakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Kita perlu mencari cara yang pas untuk menyelesaikan problem yang memiliki sensitivitas politik tinggi..... (Sebuah Sumbatan Besar)*

- 3) *Sebagaimana terekam dalam pemberitaan, ada beberapa alternatif solusi yang mengemuka. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan penghentian penyidikan karena sesuai dengan temuan Tim Delapan bukti tidak mencukupi. Alternatif terakhir adalah membiarkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Selain akan memakan waktu lama, proses ini sekaligus juga akan mendelegitimasi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuk Presiden sendiri. Pilihan ini juga bisa mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Kini, kepemimpinan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dinantikan. (Berharap Ada Solusi Akhir)*

Sedangkan skematik secara detail dari masing-masing tajuk rencana dapat dilihat seperti di bawah ini :



Penahanan yang Kontroversial

Polisi akhirnya menggunakan hak dan kewenangannya untuk menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keduanya ditahan sejak Kamis.

Jumpa pers penahanan Bibit dan Chandra digelar beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi kejaksaan dan kepolisian. Dalam putusan selanya, MK juga menyatakan Pasal 142 Undang-Undang KPK—soal pemberhentian tetap pimpinan KPK setelah dinyatakan sebagai terdakwa—ditunda pemberlakuannya.

Kita mengapresiasi putusan MK yang telah mencoba mencari solusi atas problem hukum yang memiliki kompleksitas persoalan politik dan hukum tinggi. Putusan MK yang meminta KPK menyerahkan rekaman diharapkan bisa menjernihkan persoalan seputar dugaan rekayasa ditetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka sebagaimana disangkakan kuasa hukum Bibit dan Chandra.

Polri mempunyai kewenangan menahan, tetapi publik menyayangkan langkah Polri menahan Bibit dan Chandra. Sebagaimana dijelaskan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana, "Mulai hari ini kami menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan. Persoalan obyektif dan subyektif telah terpenuhi." Dalam keterangannya, Polri juga menyinggung soal kerapnya kedua tersangka menggelar jumpa pers.

Chandra dan Bibit dipersalahkan telah menyalahgunakan kewenangan mereka karena mereka mencekal Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Anggoro dan Djoko adalah buronan kasus korupsi yang tinggal di luar negeri.

Kita memahami reaksi dan keprihatinan publik atas penahanan Bibit dan Chandra. Solidaritas masyarakat sipil dengan cepat tergalang untuk memintakan penangguhan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. Hakim MK juga menyayangkan penahanan yang dilakukan terburu-buru. Alasan penahanan yang salah satunya adalah kerapnya tersangka berbicara kepada pers juga dipertanyakan. Berbicara kepada publik adalah hak asasi manusia dan setiap tersangka tentunya mempunyai hak membela diri!

Comment [C1]: Judul

Comment [C2]: Lead

Comment [C3]: Fakta

Comment [C4]: Langkah Penanganan Kasus

Comment [C5]: Pendapat

Comment [C6]: Fakta Pendukung

Kritik publik muncul karena tuduhan Polri terhadap keduanya terus berubah-ubah dari penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, hingga pemerasan. Keraguan publik pun semakin nyata setelah terungkapnya rekaman percakapan yang diduga melibatkan Anggodo dengan sejumlah petinggi hukum negeri ini.

Comment [C7]: Pendapat

Kita berharap semua pihak berkepal dingin dan tidak sekadar unjuk kekuasaan dalam menangani masalah yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Terlalu banyak persoalan yang belum diselesaikan berkaitan dengan kisruh KPK. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang belum juga diputuskan nasibnya oleh DPR. Dalam latar itu, kita mendukung langkah hukum yang akan diambil kuasa hukum Chandra dan Bibit. Kita tak ingin koruptor melakukan serangan balik dengan memecah belah institusi negara demi untuk melanggengkan korupsi di negeri ini! (Kompas, 30 Oktober 2009)

Comment [C8]: Harapan

Kenapa Jadi Begitu?

Comment [C9]: Judul

Itulah kiranya pertanyaan yang muncul. Maksud kita soal terjadinya aksi-reaksi KPK dan Polri menyusul penahanan Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah.

Comment [C10]: Lead

Reaksi masyarakat meledak tatkala kedua unsur pimpinan KPK (nonaktif) yang sedang diperiksa polisi itu akhirnya ditahan. Penahanan dinilai tidak pada tempatnya. Reaksi yang serentak meledak sebagai jawaban masyarakat cepat menyebar, berkumulasi, dan tegang. Ya, kenapa jadi begitu?

Pertanyaan itu kita hubungkan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang baru dimulai. Baru saja dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemerintah baru dimulai dengan pertemuan kerja dari berbagai komponen masyarakat yang sepakat bekerja sama dan berkontribusi secara kreatif dan produktif bagi keberhasilan pemerintahan baru.

Comment [C11]: Fakta

Kita masuki periode pemerintahan Presiden SBY yang kedua dengan harapan besar, optimisme tinggi, dan kebersamaan yang menjanjikan. Semangat dan suasana optimis kita

tangkap sebagai suasana yang kuat dan menjanjikan sebagai modal kerja bersama. Oposisi ada, bahkan dibiarkan ada, dalam parlemen maupun di luar parlemen serta diharapkan dan diupayakan agar kritis tetapi konstruktif. Pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Boediono berada dalam posisi dan suasana memulai bekerja secara produktif, kreatif, efektif, dan efisien.

Penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka sudah mengundang kritik tajam dari sebagian masyarakat. Namun, siapa yang mengira reaksi publik begitu keras ketika Polri kemudian menahan Bibit dan Chandra. Tindakan penahanan itu membangkitkan protes, semula dari berbagai kalangan organisasi dan aktivis hukum. Namun, dalam waktu singkat, kritik dari kalangan ahli hukum itu meluas ke sejumlah tokoh masyarakat dan berkembang juga di kalangan beragam kelompok dan organisasi masyarakat luas.

Comment [C12]: Pendapat

Masuk akal jika dibiarkan tanpa redanya gerakan penentangan dan kembalinya guncangan kepercayaan publik, pengaruhnya yang negatif bergulir dan bereskalasi ke mana-mana. Hal itu tidak kita kehendaki karena eskalasi yang demikian akan mencairkan konsentrasi kita bersama mendukung pemerintahan Presiden SBY. Kita khawatir kondisi dan suasana yang sejauh ini kondusif dan optimis ikut terganggu.

Comment [C13]: Akibat

Pertimbangan itu kita kemukakan agar semua pihak, apalagi yang secara langsung terlibat, segera meredakan ketegangan dan konflik sosial tersebut. Jika dibiarkan berlarut, kerumitan persoalan bertambah. Demikian pula optimisme yang menyertai pemerintahan baru juga ikut terpengaruh secara negatif. Kepemimpinan dan tanggung jawab pihak yang terlibat diuji. Juga diuji kepemimpinan pemerintahan baru. Kita ingatkan ungkapan kebijakan lama, "Dalam keterbatasanlah, letak seninya", yakni seni mengurai dan menyelesaikan persoalan. (Kompas, 2 November 2009)

Comment [C14]: Kesimpulan

Dukungan dari Jagat Maya

Seiring dengan maraknya kasus penahanan dua unsur pimpinan nonaktif KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, muncul dukungan luas dan sangat besar.

Dukungan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, di dalam dan luar negeri. Selain mawujud di jagat riil seperti demo, dukungan juga mawujud di jagat maya (virtual). Senin (2/11), dukungan melalui situs jejaring sosial Facebook dilaporkan sudah mendekati 300.000.

Fakta di atas meneguhkan setidaknya dua hal. Yang pertama, dukungan terhadap Chandra dan Bibit dari berbagai kalangan sangat besar. Ini mungkin di luar dugaan otoritas pemerintahan yang mengambil keputusan penahanan kedua tokoh KPK di atas. Berikutnya, kita melihat bahwa dukungan tersebut telah melintas batas, tidak hanya di dunia riil, tetapi juga di dunia maya, yang hari-hari ini semakin besar pengaruhnya.

Kini, masyarakat Indonesia juga telah menjadi masyarakat multimedia. Ini berarti, dalam memperoleh informasi, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan media lama seperti surat kabar dan televisi serta radio, tetapi juga internet dan seluler.

Memang sebagian, khususnya yang berusia setengah baya atau lebih tua, masih lebih familier dengan media lama. Akan tetapi, masyarakat muda, atau yang lahir di akhir 1980-an dan awal 1990-an ke atas, umumnya lebih akrab dengan media digital. Inilah generasi digital.

Mereka inilah yang kini banyak mengambil prakarsa di ranah online. Ada yang punya obsesi di bidang bisnis, ada yang asyik menekuni teknologi, tetapi tidak sedikit pula yang antusias memanfaatkan jejaring sosial untuk mendukung satu tujuan perjuangan atau cita-cita luhur. Mendukung KPK yang sejauh ini dipandang sebagai instrumen efektif untuk pemberantasan korupsi, juga dua unsur pimpinannya yang dinilai diperlakukan tidak adil, termasuk dalam apa yang dipersepsikan sebagai upaya luhur.

Mereka yang menggalang dukungan melalui jejaring sosial online, selain mendapatkan pendukung, juga mendapatkan komentar yang blakblakan, memberi kesan bahwa yang

Comment [C15]: Judul

Comment [C16]: Lead

Comment [C17]: Fakta

disampaikan adalah suara hati nurani. Harus diakui, sekarang ini lingkup penggunaan media baru semakin luas. Dulu kita mulai menyaksikan pemanfaatan seluler, juga pengiriman berita melalui laptop, dari kawasan Gedung DPR menjelang puncak gerakan reformasi Mei 1998.

Comment [C18]: Pendapat

Di pengujung dekade pertama abad ke-21, sudah umum politisi yang turun dalam pemilihan memanfaatkan media baru untuk kampanyenya. Kandidat Presiden AS Barack Obama adalah contohnya.

Comment [C19]: Fakta Pendukung

Jadi, kalau untuk KPK dan dua unsur pimpinannya kini mengalir dukungan via internet dan SMS, maka itulah wujud dukungan dari masyarakat baru, yang tersebar di berbagai penjuru dunia, dari rentang usia yang amat beragam, dan tentunya merupakan aspirasi yang sulit diabaikan. (Kompas, 3 November 2009).

Comment [C20]: Kesimpulan

Nurani Rakyat Via Media

Comment [C21]: Judul

Dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden, tidak jarang media menempuh jalur berbeda-beda. Di alam demokrasi dan keterbukaan, hal itu lazim.

Comment [C22]: Lead

Bahkan, kadang orang mencari orientasi media dari partai mana, atau capres mana, yang didukung. Namun, menyangkut dukungan kepada KPK dan dua unsur pimpinan nonaktifnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, media di Indonesia tampaknya memperlihatkan sikap seia-sekata, lebih-lebih dari sisi semangatnya.

Pandangan umum yang dianut oleh media di Indonesia adalah ada rekayasa untuk melemahkan KPK dan penahanan Bibit dan Chandra mengusik rasa keadilan. Bahkan, pascapemutaran rekaman KPK di Mahkamah Konstitusi Selasa lalu, ada suasana umum yang menghendaki dilakukannya pemeriksaan terhadap nama-nama yang muncul dalam rekaman.

Tanpa bermaksud memuji keluarga sendiri, kita ingin menggarisbawahi sikap media Indonesia terhadap apa yang sering disebut sebagai kasus kriminalisasi KPK. Paling tidak, dari apa yang sejauh ini muncul dalam pemberitaan media di Indonesia, apakah itu cetak atau

elektronik—mencakup TV, radio, dan online—ada kesan bahwa media yang sebelumnya mungkin dicitrakan menurut orientasi politik ataupun bisnisnya, kali ini sepenuhnya berorientasi pada hati nurani rakyat, secara nyaring, dan blak-blakan.

Comment [C23]: Pendapat

Dalam kaitan ini, kita pun segera ingat pada apa yang dikenal sebagai prinsip-prinsip jurnalisme, seperti yang disampaikan oleh Bill Kovach dalam bukunya, *Elements of Journalism*. Disebutkan dalam Prinsip Kedua, meski pers punya banyak konstituen, termasuk pemasang iklan dan pemegang saham, kesetiaan pertama tetaplah kepada warga negara dan kepentingan publik lebih besar. Komitmen kepada warga ini merupakan basis kredibilitas satu organisasi pemberitaan.

Seiring dengan Prinsip Kedua di atas adalah Prinsip Pertama, yaitu kewajiban pertama jurnalisme adalah bagi kebenaran. Menurut Kovach, demokrasi bergantung pada masyarakat yang dapat memperoleh fakta yang kredibel dan akurat.

Comment [C24]: Data Pendukung

Berpegang pada kedua prinsip jurnalisme tersebut, masyarakat kini dapat mengetahui dengan gamblang apa yang terjadi di seputar KPK dan penahanan kedua unsur pimpinannya. Sebagian masyarakat dikutip geleng-geleng kepala dengan praktik kolusi antara aparat dan cukong, yang dinilai amat menjijikkan.

Comment [C25]: Pendapat

Diharapkan untuk isu-isu strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak, pers Indonesia juga dapat menggalang kebersamaan. Mungkin saja dalam menjalankan fungsi pilar keempat demokrasi, pers punya strategi berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun, satu hal yang sama bagi pers adalah fungsi mengawal proses demokratisasi, yang ditandai oleh aktivitas *check and balances*.

Tugas tersebut tidaklah ringan, tetapi justru karena itu pula diperlukan kebersamaan visi dan langkah. (Kompas, 6 November 2009)

Comment [C26]: Harapan

Menindak Mafia Peradilan

Anggodo Widjojo adalah aktor yang diduga ikut mengatur perjalanan perkara Chandra M Hamzah-Bibit Samad Rianto. Perannya begitu dominan.

Masyarakat menangkap secara gamblang peranan Anggodo ketika Mahkamah Konstitusi memutar rekaman percakapan itu. Ketika media melaporkan Anggodo melenggang meninggalkan Mabes Polri Rabu malam, reaksi keras publik muncul. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membantah Anggodo bebas. Begitu juga dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna. Anggodo pun diperiksa Tim Delapan.

Kecaman publik bisa dimengerti karena begitu terangnya peranan Anggodo. Ia leluasa menghubungi sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian untuk ikut mengatur proses penyidikan. Sangat juga bisa dimengerti jika Tim Delapan meminta Polri menetapkan Anggodo sebagai tersangka dan ditahan. Namun, sejauh ini, Polri belum bisa menemukan bukti menjerat Anggodo.

Apa yang disiarkan Mahkamah Konstitusi mempertontonkan kepada kita sebuah potret nyata bagaimana perkara bisa diatur. Keadilan bisa diperjualbelikan. Mafia peradilan melibatkan polisi, jaksa, advokat, dan dalam beberapa kasus hakim. Sebelum terungkapnya Anggodo, kita pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani. Pejabat kejaksaan ikut terkena dampaknya.

Dalam kondisi seperti itu, kita menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan pemberantasan mafia hukum dalam program 100 hari pemerintahannya. Presiden membuka PO Box 9949 untuk menerima laporan masyarakat yang menjadi korban mafia. "Saya persilakan laporkan melalui PO Box 9949 Jakarta 10000 dengan kode GM yang artinya ganyang mafia."

Kita mendukung program Presiden membersihkan mafia peradilan. Namun, perlu ada langkah lain selain membuka kotak pos karena praktik jual-beli keadilan hanya akan terungkap jika ada salah satu pihak yang menandatangani "kesepakatan" mengingkarinya.

Comment [C27]: Judul

Comment [C28]: Lead

Comment [C29]: Fakta

Comment [C30]: Fakta Pendukung

Comment [b31]: Langkah Penanganan Kasus

Comment [C32]: Saran

Presiden pun pernah memerintahkan agar pencatutan namanya dalam rekaman diusut tuntas. Karena itu, kita berharap Presiden bisa memerintahkan agar skandal penegakan hukum yang melibatkan Anggodo ditindak secara tegas. Orang yang disebut-sebut dalam rekaman diperiksa dan dinonaktifkan dari jabatannya.

Langkah Presiden yang keras dan tegas untuk menindak mafia secara nyata diharapkan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tanpa ada penindakan yang keras, kita khawatir publik mempersepsikan kita tak berdaya menghadapi mafia. Kita juga khawatir pembiaran terhadap apa yang dikerjakan Anggodo hanya akan menimbulkan masalah sosial politik yang tidak perlu. (Kompas, 6 November 2009)

Comment [C33]: Saran dan Jalan Keluar

Sebuah Sumbatan Besar

Comment [C34]: Judul

Sudah hampir dua minggu isu Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Rianto dan Chandra Hamzah menjadi perdebatan. Entah kapan isu itu berakhir.

Comment [C35]: Lead

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan/penyuapan terhadap Bibit dan Chandra memicu kontroversi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution. Perdebatan makin keras setelah Polri menahan Bibit dan Chandra beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi memutar rekaman sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penjelasan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di depan Komisi III DPR menuai bantahan dari pihak Bibit dan Chandra. Komisi III DPR juga mengundang KPK dan Kejaksaan Agung. Komisi III pun berencana mempertemukan kejaksaan, Polri, dan KPK pada 12 November. Itulah panggung politik DPR.

Comment [C36]: Fakta

Panggung lain dimainkan Tim Delapan. Tim ini memanggil sejumlah pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pihak lain yang relevan. Tim yang diberi batas waktu dua minggu itu ditugasi memverifikasi fakta yuridis dan melaporkannya kepada Presiden. Dalam kesimpulan sementara, Tim Delapan berpendapat penyidikan terhadap Bibit dan Chandra belum

memiliki bukti yang kuat. Laporan itu diserahkan kepada Presiden melalui Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Comment [C37]: Fakta Pendukung

Kita tidak tahu kapan pentas di panggung ini berakhir. Pertanyaan itu pantas kita ajukan karena sudah hampir dua minggu (bahkan lebih) publik disuguhi konflik soal Bibit dan Chandra. Agenda Rembuk Nasional sebagai agenda pembangunan bangsa tenggelam dalam hiruk-pikuk kasus itu. Program 100 hari pemerintah tanpa terasa sudah berjalan 20 hari sejak Presiden dilantik.

Comment [C38]: Pendapat

Kasus Bibit dan Chandra telah menjadi sumbatan besar. Kita seakan tak bisa segera melangkah sebelum masalah ini terselesaikan. Energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan problem ini. Padahal, pekerjaan rumah bangsa masih banyak dan menuntut konsentrasi untuk menyelesaikannya.

Comment [C39]: Akibat

Kita tetap meyakini Presiden Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan akan mampu mengurai benang kusut kasus Bibit dan Chandra serta mencari jalan keluarnya. Sumbatan besar harus dipecahkan agar kita segera bisa menyelesaikan agenda bangsa yang lain. Kita perlu mengambil hikmah dari perseteruan ini. Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi yang utama. Kita tak ingin perseteruan ini mengarah pada pelemahan lembaga.

Comment [C40]: Harapan

Dalam konteks itu, penyelesaian segera kasus Bibit dan Chandra harus diutamakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Kita perlu mencari cara yang pas untuk menyelesaikan problem yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Setelah kasus itu terselesaikan, kita bisa segera mengambil langkah menata ulang sistem peradilan pidana, khususnya sistem yang menunjang pemberantasan korupsi, serta memberantas mafia peradilan. (Kompas, 10 November 2009)

Comment [C41]: Saran dan Jalan Keluar

Berharap Ada Solusi Akhir

Pertemuan Tim Delapan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru akan berlangsung Selasa ini. Publik berharap ada solusi permanen.

Proses hukum yang dilakukan Polri terhadap Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah menciptakan situasi penuh ketidakpastian. Rakyat terbelah. Aksi jalanan terjadi. Lembaga negara berbeda sikap. Ketua MK dan Ketua MA, melalui pernyataannya di media, berbeda pandangan dengan Komisi III DPR bersama Polri. Masalahnya pun kian melebar.

Situasi penuh ketidakpastian yang dibiarkan lebih dari tiga minggu ini jelas tidak menguntungkan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono! Keinginan pemerintah untuk segera bisa merealisasikan program 100 hari seakan tersandera dengan kasus ini. Sudah 29 hari waktu terbuang!

Tim Delapan yang dibentuk Presiden Yudhoyono dengan keputusan presiden menilai belum ada bukti kuat soal penyuaipan terhadap Bibit dan Chandra. Uang suap terhenti pada Ary Muladi. Polri merasa yakin dengan petunjuk yang dimilikinya. Dengan didukung Komisi III DPR—yang sikap politiknya dikritik banyak kalangan karena berbeda dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya—memilih untuk mendorong kasus ini ke pengadilan.

Apa yang terjadi sekarang ini adalah krisis kepercayaan pada lembaga penegak hukum. Sepak terjang Anggodo Widjojo telah menampar muka kita dan kita tak berdaya menghadapinya. Kita berharap Presiden bisa mengambil solusi mengakhiri kasus yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Solusi yang mampu mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan keadilan memberikan energi baru untuk memerangi korupsi, melakukan konsolidasi institusi, dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi. Mendengar Tim Delapan adalah pilihan rasional.

Comment [C42]: Judul

Comment [C43]: Lead

Comment [C44]: Fakta

Comment [C45]: Akibat

Comment [C46]: Fakta

Comment [C47]: Pendapat

Comment [C48]: Harapan

Sebagaimana terekam dalam pemberitaan, ada beberapa alternatif solusi yang mengemuka. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan penghentian penyidikan karena sesuai dengan temuan Tim Delapan bukti tidak mencukupi. Sebagaimana dikutip Tempo, usulan ini didukung Ketua MA Harifin Tumpa. Bola ini ada di tangan kepolisian.

Kejaksaan bisa mengambil peranan dengan menghentikan penuntutan. Langkah ini bisa diambil daripada berkas perkara bolak-balik antara Polri dan kejaksaan. Jaksa Agung pun sebenarnya punya kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden pun bisa mengambil langkah dengan memberikan abolisi. Namun, untuk pemberian abolisi, Presiden perlu mendengar pertimbangan DPR.

Alternatif terakhir adalah membiarkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Selain akan memakan waktu lama, proses ini sekaligus juga akan mendelegitimasi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuk Presiden sendiri. Pilihan ini juga bisa mengganggu agenda pemberantasan korupsi.

Kini, kepemimpinan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dinantikan! (Kompas, 17 November 2009)

Comment [C49]: Saran dan Jalan Keluar

Pelajaran Kasus Bibit-Chandra

Comment [C50]: Judul

Proses penyelesaian di luar pengadilan atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akhirnya dituntaskan kejaksaan hari Selasa kemarin.

Comment [C51]: Lead

Kejaksaan Agung menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) atas dugaan kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh kedua wakil ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Berbagai kalangan yang tidak sabar sempat bertanya, mengapa kejaksaan tidak segera mengambil posisi sesuai dengan arah solusi di luar proses pengadilan sebagaimana disampaikan Presiden tanggal 23 November lalu.

Comment [C52]: Fakta

Pertanyaan itu terdengar kencang, lebih-lebih karena kepolisian langsung mengambil langkah cepat, tidak terlalu lama setelah Presiden mendorong proses penyelesaian di luar pengadilan. Sudah pasti kejaksaan mempunyai alasan dan pertimbangan tersendiri mengapa membutuhkan waktu agak lama sebelum mengeluarkan putusan.

Bagaimanapun putusan Presiden, kejaksaan, dan kepolisian perlu diapresiasi karena telah menghentikan kehebohan atas kasus Bibit-Chandra yang telah menguras banyak pikiran dan tenaga. Tanpa bermaksud mengabaikan hukum, penyelesaian di luar pengadilan dapat dianggap terobosan, khususnya dalam situasi genting.

Perdebatan antara penyelesaian hukum dan sosiologis, lebih-lebih dalam situasi krisis, tidak bermakna lagi jika persoalan dibiarkan terkatung-katung sampai berkembang tak terkendali. Sebagai masalah hukum, kasus Bibit-Chandra memiliki kompleksitas tersendiri. Lebih rumit lagi karena persoalan hukum selalu berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat.

Tanpa bermaksud meremehkan kompleksitas kasus Bibit-Chandra, tidak sedikit kalangan bergumam, mengapa sebuah penyelesaian baru bisa tercapai setelah menguras banyak perhatian, pikiran, dan energi. Tidakkah ada penyelesaian cepat, cermat dan tanpa harus membuang waktu? Suka atau tidak, silang pendapat mengenai kasus Bibit-Chandra telah membuat berbagai persoalan penting bangsa terdesak jauh ke belakang. Konsentrasi pemerintah dan masyarakat terpecah oleh tarikan kasus itu.

Comment [C53]: Pendapat

Lebih memprihatinkan lagi, kasus Bibit-Chandra tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mempertontonkan polarisasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Polarisasi itu menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang kesamaan dan kesatuan komitmen ketiga lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. |

Comment [C54]: Akibat

Jelas pula, polarisasi dan friksi itu tidak bisa dibiarkan karena akan mengancam keompakan dalam upaya terpadu melawan praktik korupsi yang masih merajalela. Kiranya juga dari kasus Bibit-Chandra, bangsa Indonesia mendapat momentum besar untuk melakukan terobosan penting dalam kampanye pemberantasan korupsi, mengakhiri mafia peradilan, dan mendorong penciptaan tata kelola yang baik, bersih, dan efektif, good and clean governance, dalam tubuh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. (Kompas, 2 Desember 2009)

Comment [C55]: Kesimpulan

Tabel IV

Skematik Tajuk Rencana Kompas

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana	Skematik
1	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan Yang Kontroversial	Pada <i>lead</i> dinyatakan tentang penahanan Bibit dan Chandra oleh Polri. Kemudian dijelaskan seputar fakta jumpa pers perihal penahanan yang digelar setelah MK meminta penyerahan rekaman percakapan Anggodo dengan para petinggi kejaksaan dan kepolisian. Selanjutnya dipaparkan mengenai 'ketidaksetujuan' publik atas penahanan tersebut. Di akhir tajuk rencana diungkapkan harapan kepada semua pihak untuk berkepal dingin dalam menangani masalah ini.
2	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?	Dalam <i>lead</i> dinyatakan bahwa pertanyaan seperti pada judul lah yang kira-kira muncul terkait dengan aksi-reaksi kasus penahanan Bibit dan Chandra. Setelah itu dijabarkan fakta mengenai pemerintahan SBY dan Boediono yang baru saja dimulai serta semangat tinggi yang mengiringinya. Pendapat tentang penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka yang ternyata mengundang berbagai kritik publik pun diungkapkan. Di akhir paragraf ditulis kesimpulan yang intinya bahwa jika dibiarkan terus berlarut, maka persoalan pun akan bertambah.
3	Kompas, 3 November 2009	Dukungan Dari Jagat Maya	Diawali dengan <i>lead</i> yang menyatakan bahwa dukungan dari berbagai pihak yang semakin meluas seiring dengan maraknya kasus penahanan Bibit - Chandra, dan fakta mengenai dukungan dari masyarakat yang ternyata tidak hanya di dunia riil saja, melainkan hingga ke dunia maya. Selanjutnya Kompas menyatakan bahwa dukungan yang datang dari jejaring sosial <i>online</i> merupakan suara hati nurani mereka. Pada akhir tajuk, diberikan kesimpulan bahwa dukungan yang begitu meluas dari

			berbagai kalangan merupakan aspirasi rakyat yang sulit diabaikan.
4	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media	<i>Lead</i> berisi pernyataan bahwa dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden, tidak jarang media menempuh jalur berbeda-beda. Kemudian pendapat mengenai sikap media Indonesia terhadap apa yang sering disebut sebagai kasus kriminalisasi KPK. Diiringi dengan data pendukung tentang Prinsip Pertama dari Elemen jurnalisme, yaitu kewajiban pertama jurnalisme adalah bagi kebenaran. Terakhir ditutup dengan harapan pers Indonesia juga dapat menggalang kebersamaan untuk isu-isu strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak.
5	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan	Dalam <i>lead</i> dinyatakan dugaan Anggodo Widjojo sebagai aktor ikut mengatur perjalanan perkara Bibit dan Chandra. Selanjutnya diuraikan fakta bahwa Tim Delapan meminta Polri menetapkan Anggodo sebagai tersangka dan ditahan. Namun, sejauh ini, Polri belum bisa menemukan bukti menjerat Anggodo. Selain itu dipaparkan pula mengenai presiden yang membuka PO Box 9949 untuk menerima laporan masyarakat yang menjadi korban mafia. Kemudian diakhiri dengan harapan bahwa langkah Presiden yang keras dan tegas untuk menindak mafia secara nyata bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
6	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar	Pada <i>lead</i> diungkapkan bahwa sudah hampir dua minggu isu Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit dan Chandra menjadi perdebatan, diiringi dengan fakta dari Tim Delapan yang dalam kesimpulan sementara, berpendapat penyidikan terhadap Bibit dan Chandra belum memiliki bukti yang kuat. Kemudian Kompas memberikan pendapatnya bahwa energi

			<p>bangsa terkuras untuk menyelesaikan problem ini. Padahal, pekerjaan rumah bangsa masih banyak. Di akhir, diberikan saran agar penyelesaian segera kasus Bibit dan Chandra harus diutamakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum.</p>
7	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir	<p>Pada <i>lead</i> diinformasikan tentang pertemuan Tim Delapan dan Presiden yang akan berlangsung. Dan untuk itu publik berharap akan adanya solusi permanen. Setelah itu dipaparkan fakta mengenai proses hukum Bibit dan Chandra yang menuai banyak aksi, dan juga perbedaan sikap yang terjadi di antara lembaga negara, yakni MA, Polri dan DPR. Kemudian Kompas juga mengungkap akibat dari situasi yang penuh ketidakpastian ini, yang ternyata sangat tidak menguntungkan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono. Pada bagian akhir diungkapkan mengenai beberapa solusi yang mengemuka di masyarakat.</p>
8	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit - Chandra	<p>Pada <i>lead</i> tajuk rencana dipaparkan mengenai proses penyelesaian di luar pengadilan atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akhirnya dituntaskan kejaksaan. Lebih lanjut, Kompas dalam opininya mengapresiasi putusan Presiden, kejaksaan, dan kepolisian karena telah menghentikan kehebohan atas kasus Bibit-Chandra yang telah menguras banyak pikiran dan tenaga. Dan pada paragraf terakhir Kompas menyimpulkan bahwa dari kasus Bibit-Chandra, bangsa Indonesia mendapat momentum besar untuk melakukan terobosan penting dalam kampanye pemberantasan korupsi, dsb.</p>

A. Semantik Tajuk Rencana Kompas

Dalam pengertian umum, semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks.⁷⁷

1. Latar

Latar merupakan bagian teks yang dapat mempengaruhi arti yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat penulis yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat penulis sangat beralasan. Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks.⁷⁸ Penyajian elemen latar dalam suatu teks biasanya berupa latar peristiwa atau historis. Namun setelah dianalisis, ternyata tajuk rencana Kompas kesemuanya menggunakan latar peristiwa yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dalam tajuk rencana tanggal 30 Oktober 2009 berjudul *Penahanan Yang Kontroversial*, latar yang diungkapkan untuk mendukung tema yakni mengenai pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana seputar penahanan terhadap Bibit dan Chandra yang

⁷⁷ Eriyanto, *op.cit.*, hal. 231-232.

⁷⁸ Eriyanto, *op.cit.*, hal. 235.

akhirnya mendapat kontroversi dari banyak pihak, terutama masyarakat yang menyayangkan langkah tersebut.

Polri mempunyai kewenangan menahan, tetapi publik menyayangkan langkah Polri menahan Bibit dan Chandra. Sebagaimana dijelaskan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana, "Mulai hari ini kami menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan. Persoalan obyektif dan subyektif telah terpenuhi." Dalam keterangannya, Polri juga menyinggung soal kerapnya kedua tersangka menggelar jumpa pers.

Penggunaan latar tersebut memiliki tujuan untuk menginformasikan perihal proses penahanan yang menurut Polri sebagai pihak yang memiliki kewenangan tersebut adalah tidak menyalahi prosedur hukum dan hal tersebut dilakukan karena Polri memiliki hak atas hal tersebut. Kalimat terakhir pada kutipan di atas menegaskan pula mengenai salah satu alasan dilakukannya penahanan kedua pimpinan non aktif KPK oleh polri.

Dalam tajuk yang berjudul *Kenapa Jadi Begini?* latar yang ditampilkan adalah soal reaksi masyarakat menanggapi peristiwa penahanan Bibit dan Chandra. Pertanyaan dalam judul muncul karena melihat aksi dan reaksi terhadap kasus yang memiliki sensitivitas hukum dan politik yang tinggi itu.

Reaksi masyarakat meledak tatkala kedua unsur pimpinan KPK (nonaktif) yang sedang diperiksa polisi itu akhirnya ditahan. Penahanan dinilai tidak pada tempatnya. Reaksi yang serentak meledak sebagai jawaban masyarakat cepat menyebar, berkumulasi, dan tegang.

Melalui latar tersebut Kompas ingin menjelaskan kondisi masyarakat setelah munculnya berita penahanan Bibit dan Chandra. Masyarakat yang pro dengan kedua pimpinan non aktif KPK serta merta menimbulkan berbagai macam reaksi yang intinya mengungkapkan keprihatinan masyarakat terhadap keduanya dan ketidaksetujuan terhadap langkah polri.

Sementara itu latar yang ditampilkan dalam tajuk rencana edisi 3 November 2009 yang berjudul *Dukungan dari Jagat Maya* yaitu berupa bentuk-bentuk dukungan dari masyarakat yang kian hari kian meluas, terutama yang datang dari dunia maya. Kompas bermaksud menginformasikan secara jelas mengenai berbagai macam dukungan terhadap Bibit dan Chandra dari masyarakat.

Dukungan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, di dalam dan luar negeri. Selain mewujud di jagat riil seperti demo, dukungan juga mewujud di jagat maya (virtual). Senin (2/11), dukungan melalui situs jejaring sosial Facebook dilaporkan sudah mendekati 300.000.

Sementara itu dalam tajuk rencana edisi 6 November 2009 yang juga mengangkat perihal dukungan rakyat, latar yang mendukung tema dan judul adalah sebagai berikut:

Paling tidak, dari apa yang sejauh ini muncul dalam pemberitaan media di Indonesia, apakah itu cetak atau elektronik—mencakup TV, radio, dan online—ada kesan bahwa media yang sebelumnya mungkin dicitrakan menurut orientasi politik ataupun bisnisnya, kali ini sepenuhnya berorientasi pada hati nurani rakyat, secara nyaring, dan blak-blakan.

commit to user

Dalam kutipan di atas dapat ditangkap maksud dari Kompas yang ingin menyampaikan bahwa media saat ini berbeda dengan yang dulu. Hal itu dibuktikan dengan pemberitaan yang muncul di media akhir-akhir ini, terkait masalah kasus Bibit dan Chandra, yang memberikan kesan bahwa dalam pemberitannya sesuai dengan hati nurani rakyat, tidak lebih condong kepada kepentingan bisnis, politik, dan sebagainya.

Dan dalam tajuk rencana Kompas lainnya pada tanggal 6 November 2009 yang menyoroti masalah hukum kasus dua pimpinan non aktif KPK, latar belakang yang ditunjukkan yakni tentang masyarakat yang kemudian mengetahui begitu terangnya peranan Anggodo. Ia leluasa menghubungi sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian untuk ikut mengatur proses penyidikan.

Kecaman publik bisa dimengerti karena begitu terangnya peranan Anggodo. Ia leluasa menghubungi sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian untuk ikut mengatur proses penyidikan. Sangat juga bisa dimengerti jika Tim Delapan meminta Polri menetapkan Anggodo sebagai tersangka dan ditahan. Namun, sejauh ini, Polri belum bisa menemukan bukti menjerat Anggodo. Apa yang disiarkan Mahkamah Konstitusi mempertontonkan kepada kita sebuah potret nyata bagaimana perkara bisa diatur. Keadilan bisa diperjualbelikan.

Dalam tajuk rencana yang berjudul *Sebuah Sumbatan Besar*, latar yang dimuat yaitu bahwa konflik Bibit dan Chandra amat berpengaruh pada pemerintahan kita. Agenda Rembuk Nasional justru tenggelam karena hebohnya kasus yang terjadi.

Kita tidak tahu kapan pentas di panggung ini berakhir. Pertanyaan itu pantas kita ajukan karena sudah hampir dua minggu (bahkan

lebih) publik disuguhi konflik soal Bibit dan Chandra. Agenda Rembuk Nasional sebagai agenda pembangunan bangsa tenggelam dalam hiruk-pikuk kasus itu. Program 100 hari pemerintah tanpa terasa sudah berjalan 20 hari sejak Presiden dilantik.

Senada dengan tajuk rencana di atas, pada tajuk rencana Kompas berjudul *Berharap Ada Solusi Akhir*, yang menjadi latar yakni situasi ketidakpastian atas penanganan kasus hukum Bibit dan Chandra yang telah berlangsung lebih dari tiga minggu. Hal ini jelas berdampak pada pemerintahan baru Kabinet Bersatu Jilid II yang baru sekitar sebulan terbentuk. Untuk itulah segera diperlukan adanya solusi akhir atas penyelesaian kasus agar tidak bertambah melebar dan berpengaruh negatif lebih banyak lagi.

Situasi penuh ketidakpastian yang dibiarkan lebih dari tiga minggu ini jelas tidak menguntungkan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono! Keinginan pemerintah untuk segera bisa merealisasikan program 100 hari seakan tersandera dengan kasus ini. Sudah 29 hari waktu terbuang!

Sedangkan untuk tajuk rencana pada tanggal 2 Desember 2009 dengan judul *Pelajaran Kasus Bibit-Chandra*, yang melatarbelakanginya yakni proses penyelesaian di luar pengadilan yang akhirnya dituntaskan oleh Kejaksaan. Setelah lama berlarut-larut, langkah tersebut akhirnya diambil. Dan Kompas kemudian berharap bahwa kasus Bibit dan Chandra ini menjadi suatu momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan terobosan penting dalam kampanye pemberantasan korupsi, mengakhiri mafia peradilan, dan mendorong penciptaan tata kelola yang baik, bersih, *commit to user*

dan efektif, *good and clean governance*, dalam tubuh KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

Proses penyelesaian di luar pengadilan atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akhirnya dituntaskan kejaksaan hari Selasa kemarin.

Tabel V

Latar Tajuk Rencana Kompas

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana	Latar
1.	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan Yang Kontroversial	Pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana seputar penahanan terhadap Bibit dan Chandra.
2.	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?	Reaksi masyarakat menanggapi peristiwa penahanan Bibit dan Chandra.
3.	Kompas, 3 November 2009	Dukungan dari Jagat Maya	Bentuk-bentuk dukungan dari masyarakat yang kian hari kian meluas, terutama yang datang dari dunia maya.
4.	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media	Pemberitaan yang muncul di media akhir-akhir ini, terkait masalah kasus Bibit dan Chandra, yang memberikan kesan bahwa dalam pemberitannya sesuai dengan hati nurani rakyat.
5.	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan	Masyarakat yang kemudian mengetahui begitu terangnya peranan Anggodo. Ia leluasa menghubungi sejumlah pejabat di

			kejaksaan dan kepolisian untuk ikut mengatur proses penyidikan.
6.	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar	Konflik Bibit dan Chandra amat berpengaruh pada pemerintahan kita. Agenda Rembuk Nasional justru tenggelam karena hebohnya kasus yang terjadi.
7.	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir	Situasi ketidakpastian atas penanganan kasus hukum Bibit dan Chandra yang telah berlangsung lebih dari tiga minggu.
8.	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit – Chandra	Proses penyelesaian di luar pengadilan yang akhirnya dituntaskan oleh Kejaksaan. Setelah lama berlarut-larut, langkah tersebut akhirnya diambil.

2. Detail

Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Informasi yang menguntungkan komunikator, ditampilkan secara berlebih, detail yang lengkap kalau perlu dengan data-data. Sebaliknya informasi yang merugikan komunikator akan ditampilkan sedikit mungkin, bahkan bila perlu dihilangkan.

Elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara implisit. Sikap atau wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadangkala tidak perlu disampaikan secara

terbuka, tetapi dari detail bagian mana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detail yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan media.⁷⁹

Dalam tajuk rencana *Penahanan Yang Kontroversial*, Kompas mengungkapkan detail mengenai jumpa pers yang diadakan setelah dilakukan penahanan terhadap Bibit dan Chandra.

Jumpa pers penahanan Bibit dan Chandra digelar beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi kejaksaan dan kepolisian. Dalam putusan selanya, MK juga menyatakan Pasal 142 Undang-Undang KPK—soal pemberhentian tetap pimpinan KPK setelah dinyatakan sebagai terdakwa—ditunda pemberlakuannya.

Sementara itu dalam tajuk rencana berjudul *Kenapa Jadi Begini* Kompas menyajikan detail mengenai reaksi yang muncul ketika Polri akhirnya menahan Bibit dan Chandra.

Penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka sudah mengundang kritik tajam dari sebagian masyarakat. Namun, siapa yang mengira reaksi publik begitu keras ketika Polri kemudian menahan Bibit dan Chandra. Tindakan penahanan itu membangkitkan protes, semula dari berbagai kalangan organisasi dan aktivis hukum. Namun, dalam waktu singkat, kritik dari kalangan ahli hukum itu meluas ke sejumlah tokoh masyarakat dan berkembang juga di kalangan beragam kelompok dan organisasi masyarakat luas.

Detail yang dimuat Kompas pada tajuk rencananya yang berjudul *Dukungan dari Jagat Maya* yakni mengenai dukungan dari masyarakat berbagai kalangan yang banyak bermunculan dan tidak hanya di dunia riil,

⁷⁹ Eriyanto, *op.cit*, hal. 238.

tapi juga di dunia maya, dibuktikan dengan dukungan dari situs jejaring sosial *Facebook*, yang saat itu sudah mencapai 300.000 orang.

Dukungan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, di dalam dan luar negeri. Selain mewujud di jagat riil seperti demo, dukungan juga mewujud di jagat maya (virtual). Senin (2/11), dukungan melalui situs jejaring sosial Facebook dilaporkan sudah mendekati 300.000.

Dalam tajuk rencananya berjudul *Sebuah Sumbatan Besar*, Kompas memuat detail mengenai tim yang dibentuk oleh Presiden dalam upaya mempercepat penuntasan kasus, yakni pembentukan Tim Delapan. Langkah Tim Delapan inilah yang kemudian dijelaskan secara detail oleh Kompas.

Panggung lain dimainkan Tim Delapan. Tim ini memanggil sejumlah pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pihak lain yang relevan. Tim yang diberi batas waktu dua minggu itu ditugasi memverifikasi fakta yuridis dan melaporkannya kepada Presiden. Dalam kesimpulan sementara, Tim Delapan berpendapat penyidikan terhadap Bibit dan Chandra belum memiliki bukti yang kuat.

Sedangkan pada tajuk rencana berjudul *Berharap Ada Solusi Akhir*, Kompas menyajikan detail mengenai beberapa alternatif solusi yang mengemuka.

Sebagaimana terekam dalam pemberitaan, ada beberapa alternatif solusi yang mengemuka. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan penghentian penyidikan karena sesuai dengan temuan Tim Delapan bukti tidak mencukupi. Sebagaimana dikutip Tempo, usulan ini didukung Ketua MA Harifin Tumpa. Bola ini ada di tangan kepolisian.

Kejaksaan bisa mengambil peranan dengan menghentikan penuntutan. Langkah ini bisa diambil daripada berkas perkara

bolak-balik antara Polri dan kejaksaan. Jaksa Agung pun sebenarnya punya kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden pun bisa mengambil langkah dengan memberikan abolisi. Namun, untuk pemberian abolisi, Presiden perlu mendengar pertimbangan DPR.

Alternatif terakhir adalah membiarkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Selain akan memakan waktu lama, proses ini sekaligus juga akan mendelegitimasi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuk Presiden sendiri. Pilihan ini juga bisa mengganggu agenda pemberantasan korupsi.

Tabel VI
Detail Tajuk Rencana Kompas

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana	Detail
1.	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan Yang Kontroversial	Jumpa pers yang diadakan setelah dilakukan penahanan terhadap Bibit dan Chandra.
2.	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?	Reaksi yang muncul ketika Polri akhirnya menahan Bibit dan Chandra.
3.	Kompas, 3 November 2009	Dukungan dari Jagat Maya	Dukungan dari masyarakat berbagai kalangan yang banyak bermunculan dan tidak hanya di dunia riil, tapi juga di dunia maya.
4.	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media	-
5.	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan	-
6.	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar	Langkah Tim Delapan.
7.	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir	Beberapa alternatif solusi penanganan kasus yang mengemuka.
8.	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit – Chandra <i>commit to user</i>	-

3. Maksud

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detail. Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator. Dalam konteks media, elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lain.⁸⁰

Penggunaan elemen maksud digunakan secara strategis pula dalam teks tajuk rencana. Pendapat atau pernyataan penulis tajuk rencana diungkapkan menurut kepentingan penulis dengan melihat kecenderungan khalayak dalam menanggapi suatu isu. Dalam tajuk rencana terkait kasus penahanan Bibit dan Chandra, maksud yang ditampilkan pada tiap tajuknya dapat dilihat pada penjabaran berikut.

Dalam tajuk rencana edisi 30 November 2009, maksud yang dituliskan Kompas yakni mengenai pernyataan Irjen Dikdik Mulyana atas langkah Polri melakukan penahanan. Maksud tersebut diungkapkan secara eksplisit.

Polri mempunyai kewenangan menahan, tetapi publik menyayangkan langkah Polri menahan Bibit dan Chandra.

commit to user

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 240-241

Sebagaimana dijelaskan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana, "Mulai hari ini kami menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan. Persoalan obyektif dan subyektif telah terpenuhi." Dalam keterangannya, Polri juga menyinggung soal kerapnya kedua tersangka menggelar jumpa pers.

Senada dengan tajuk rencana tersebut, pendapat redaksi Kompas yang berjudul *Kenapa Jadi Begini?*, maksud yang dituliskan secara eksplisit, yakni tentang pengaruh negatif yang mungkin terjadi apabila pertentangan yang terjadi di antara publik tetap dibiarkan, karena hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan terganggunya suasana yang kondusif.

Masuk akal jika dibiarkan tanpa redanya gerakan penentangan dan kembalinya guncangan kepercayaan publik, pengaruhnya yang negatif bergulir dan bereskalasi ke mana-mana. Hal itu tidak kita kehendaki karena eskalasi yang demikian akan mencairkan konsentrasi kita bersama mendukung pemerintahan Presiden SBY. Kita khawatir kondisi dan suasana yang sejauh ini kondusif dan optimis ikut terganggu.

Sementara pada tajuk rencana berjudul *Dukungan Dari Jagat Maya*, maksud dengan cara terang-terangan pun dituliskan, dimana menjelaskan perihal dukungan dari publik yang muncul semakin banyak dan besar, baik di dunia riil maupun di dunia maya.

Dukungan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, di dalam dan luar negeri.....
Fakta di atas meneguhkan setidaknya dua hal. Yang pertama, dukungan terhadap Chandra dan Bibit dari berbagai kalangan sangat besar. Ini mungkin di luar dugaan otoritas pemerintahan yang mengambil keputusan penahanan kedua tokoh KPK di atas. Berikutnya, kita melihat bahwa dukungan tersebut telah melintas

batas, tidak hanya di dunia riil, tetapi juga di dunia maya, yang hari-hari ini semakin besar pengaruhnya.

Pada tajuk rencana edisi 6 November 2009 berjudul *Nurani Rakyat Via Media*, maksud ditunjukkan pula secara eksplisit. Yaitu tentang sikap media pada saat ini.

Tanpa bermaksud memuji keluarga sendiri, kita ingin menggarisbawahi sikap media Indonesia terhadap apa yang sering disebut sebagai kasus kriminalisasi KPK. Paling tidak, dari apa yang sejauh ini muncul dalam pemberitaan media di Indonesia, apakah itu cetak atau elektronik—mencakup TV, radio, dan online—ada kesan bahwa media yang sebelumnya mungkin dicitrakan menurut orientasi politik ataupun bisnisnya, kali ini sepenuhnya berorientasi pada hati nurani rakyat, secara nyaring, dan blak-blakan.

Masih dengan cara eksplisit, Kompas dalam tajuk rencana *Menindak Mafia Peradilan* menjelaskan perihal langkah yang ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi melawan mafia peradilan, yakni dengan membuka PO BOX 9949.

Dalam kondisi seperti itu, kita menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan pemberantasan mafia hukum dalam program 100 hari pemerintahannya. Presiden membuka PO Box 9949 untuk menerima laporan masyarakat yang menjadi korban mafia. "Saya persilakan laporkan melalui PO Box 9949 Jakarta 10000 dengan kode GM yang artinya ganyang mafia."

Hampir sama dengan detail yang ditunjukkan, maksud yang disampaikan dalam tajuk rencana *Sebuah Sumbatan Besar* menjelaskan mengenai Tim Delapan, yang dibentuk oleh Presiden.

Panggung lain dimainkan Tim Delapan. Tim ini memanggil sejumlah pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pihak lain yang

relevan. Tim yang diberi batas waktu dua minggu itu ditugasi memverifikasi fakta yuridis dan melaporkannya kepada Presiden. Dalam kesimpulan sementara, Tim Delapan berpendapat penyidikan terhadap Bibit dan Chandra belum memiliki bukti yang kuat. Laporan itu diserahkan kepada Presiden melalui Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Pada tajuk rencana berjudul *Berharap Ada Solusi Akhir*, maksud yang ingin ditunjukkan sangat jelas terbaca. Yakni tentang beberapa alternatif solusi penyelesaian kasus.

Kita berharap Presiden bisa mengambil solusi mengakhiri kasus yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Solusi yang mampu mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan keadilan memberikan energi baru untuk memerangi korupsi, melakukan konsolidasi institusi, dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi.

Sebagaimana terekam dalam pemberitaan, ada beberapa alternatif solusi yang mengemuka. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan penghentian penyidikan karena sesuai dengan temuan Tim Delapan bukti tidak mencukupi. Bola ini ada di tangan kepolisian.

Kejaksaan bisa mengambil peranan dengan menghentikan penuntutan.

Alternatif terakhir adalah membiarkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Selain akan memakan waktu lama, proses ini sekaligus juga akan mendelegitimasi rekomendasi Tim Delapan yang dibentuk Presiden sendiri. Pilihan ini juga bisa mengganggu agenda pemberantasan korupsi.

Dalam tajuk rencana *Pelajaran Kasus Bibit – Chandra*, dituliskan tentang kejaksaan yang pastilah memiliki alasan mengapa membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan putusan. Hal ini diungkapkan secara implisit.

Pertanyaan itu terdengar kencang, lebih-lebih karena kepolisian langsung mengambil langkah cepat, tidak terlalu lama setelah Presiden mendorong proses penyelesaian di luar pengadilan. Sudah pasti kejaksaan mempunyai alasan dan pertimbangan tersendiri mengapa membutuhkan waktu agak lama sebelum mengeluarkan putusan.

Tabel VII

Maksud Tajuk Rencana Kompas

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana	Maksud
1.	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan Yang Kontroversial	Eksplisit
2.	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?	Eksplisit
3.	Kompas, 3 November 2009	Dukungan dari Jagat Maya	Eksplisit
4.	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media	Eksplisit
5.	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan	Eksplisit
6.	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar	Eksplisit
7.	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir	Eksplisit
8.	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit – Chandra	Implisit

4. Praanggapan

Strategi semantik elemen wacana pengandaian atau praanggapan (*presupposition*) merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti upaya mendukung dengan memberi latar belakang, maka pengandaian adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Pengandaian

hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya tidak perlu dipertanyakan.

Dalam tajuk rencana berjudul *Kenapa Jadi Begini*, praanggapan yang muncul adalah pengaruh aksi-reaksi atas kasus Bibit dan Chandra yang dapat mencairkan konsentrasi dalam mendukung Pemerintahan SBY, dimana telah ada suasana kondusif dan optimis.

Masuk akal jika dibiarkan tanpa redanya gerakan penentangan dan kembalinya guncangan kepercayaan publik, pengaruhnya yang negatif bergulir dan bereskalasi ke mana-mana. Hal itu tidak kita kehendaki karena eskalasi yang demikian akan mencairkan konsentrasi kita bersama mendukung pemerintahan Presiden SBY. Kita khawatir kondisi dan suasana yang sejauh ini kondusif dan optimis ikut terganggu.

Praanggapan yang muncul dalam tajuk rencana berjudul *Menindak Mafia Peradilan* adalah kekhawatiran publik yang mempersepsikan ketidakberdayaan menghadapi mafia peradilan apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menindak mafia peradilan.

Langkah Presiden yang keras dan tegas untuk menindak mafia secara nyata diharapkan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tanpa ada penindakan yang keras, kita khawatir publik mempersepsikan kita tak berdaya menghadapi mafia Kita juga khawatir pembiaran terhadap apa yang dikerjakan Anggodo hanya akan menimbulkan masalah sosial politik yang tidak perlu.

Dalam tajuk rencana *Pelajaran Kasus Bibit-Chandra*, Kompas kembali mengungkapkan anggapan yang akan terjadi apabila sesuatu itu dibiarkan, dalam hal ini adalah polarisasi yang terjadi pada pihak-pihak

yang berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni KPK, Polri dan Kejaksaan.

Jelas pula, polarisasi dan friksi itu tidak bisa dibiarkan karena akan mengancam kekompakan dalam upaya terpadu melawan praktik korupsi yang masih merajalela.

Tabel VIII

Praanggapan Tajuk Rencana Kompas

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana	Praanggapan
1.	Kompas, 30 Oktober 2009	Penahanan Yang Kontroversial	-
2.	Kompas, 2 November 2009	Kenapa Jadi Begini?	Pengaruh aksi-reaksi atas kasus Bibit dan Chandra.
3.	Kompas, 3 November 2009	Dukungan dari Jagat Maya	-
4.	Kompas, 6 November 2009	Nurani Rakyat Via Media	-
5.	Kompas, 6 November 2009	Menindak Mafia Peradilan	Kekhawatiran publik yang mempersepsikan ketidakberdayaan pemerintah menghadapi mafia peradilan.
6.	Kompas, 10 November 2009	Sebuah Sumbatan Besar	-
7.	Kompas, 17 November 2009	Berharap Ada Solusi Akhir	-
8.	Kompas, 2 Desember 2009	Pelajaran Kasus Bibit – Chandra	Polarisasi yang terjadi pada pihak-pihak yang berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tajuk rencana yang merupakan satu cara sebuah media menyampaikan pendapatnya lazim ada di setiap surat kabar. Dalam tajuk rencana biasanya tidak luput dari berita-berita yang disajikan pada surat kabar tersebut pada saat itu. Artinya, tajuk rencana biasanya merupakan opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Suatu pendapat atau opini tersebut dapat disajikan apakah secara terbuka atautkah secara tersamar.

Hal itulah yang ingin coba dibuka dalam penelitian ini. Bagaimanakah penggambaran secara tekstual dalam tajuk rencana, seperti tematik, skematik dan sematik yang dimuat oleh Harian Kompas berkenaan dengan kasus yang melibatkan dua pimpinan non aktif Bibit dan Chandra. Hal ini membantu khalayak untuk memahami teks lebih dalam, sehingga mereka bisa tahu ke arah mana sesungguhnya mereka akan dibawa. Lebih jauh lagi, penggambaran tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan Harian Kompas sendiri menanggapi permasalahan yang sedang bergulir.

Sasaran akhir penelitian adalah ingin menjawab permasalahan penelitian dan membuktikan tujuan penelitian. Untuk itu, berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

commit to user

Pertama, dari kesemua hasil analisis teks penulis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Kompas memandang kasus yang terjadi itu dari berbagai sisi, yakni dari permasalahan kasus hukum, pengaruhnya kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang baru saja terbentuk dan dari masalah sosial perihal gelombang dukungan dari publik yang membela Bibit dan Chandra. Namun, Kompas menitikberatkan pada permasalahan kasus ditinjau dari segi hukum. Hal ini bisa dimaklumi karena memang kasus yang sedang bergulir digolongkan dalam kasus hukum yang ternyata sangat rumit.

Kedua, dalam pendapatnya, Kompas banyak memandang dari segi akibat dari kasus yang sedang terjadi. Akibat ini dinilai sebagai dampak dari proses penyelesaian kasus yang sangat bertele-tele. Kekhawatiran Kompas akan dampak yang lebih luas juga tercermin dalam beberapa tajuk rencananya.

Ketiga, terkait dengan wacana penanganan kasus, menurut penulis Kompas banyak menyetujui atau setidaknya mengungkapkan penghargaan kepada pemerintah yang telah bekerja keras berusaha menyelesaikan kasus tersebut beserta langkah-langkah yang diambilnya. Hal ini dibuktikan dengan kata ‘mengapresiasi’ yang sering muncul ketika membahas langkah yang ditempuh oleh satu pihak dalam rangka memerangi korupsi di negeri ini.

Keempat, menurut isinya, tajuk rencana Kompas dikategorikan sebagai tajuk rencana informatif, karena berisi informasi dan keterangan-keterangan latar belakang sesuatu hal atau masalah. Jenis tajuk ini juga dinamakan tajuk bersifat interpretasi, penjelasan atau penggelaran.

B. Saran

1. Penulis menyadari penelitian yang dilakukan jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Penulis hanya melakukan penelitian dalam level teks, sedangkan penelitian masih bisa dilakukan dengan analisis sosial dan kognisi sosial agar dapat lebih menggali data secara lebih terperinci lagi dan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih mendalam.
2. Penelitian tajuk rencana suatu media, terutama cetak dengan menggunakan analisis wacana masih terbentang luas. Untuk itu diharapkan untuk generasi selanjutnya dapat lebih mendalam dalam melakukan penelitian baik apabila menggunakan metode penelitian yang sama maupun dengan metode penelitian yang berbeda. Hal ini penting untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Komunikasi.